

## PERNYATAAN



Dengan ini saya MUSARADDIN NPM 1303100005 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan atau plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan harus di hukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau yang diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di acu di dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi sesuai hukum berupa :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian skripsi saya batalkan.
2. Pencabutan kembali gelar keserjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

**Medan, September 2016**

**MUSARADDIN**

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PEMERINTAHAN KAMPUNG DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINISTRASI MASARAKAT DI DESA ARUL PUTIH KABUPATEN ACEH TENGAH**

**Oleh :**

**MUSARADDIN**

**1303100005**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Qanun No.4 Tahun 2011 tentang pemerintahan kampung dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi masyarakat di desa arul putih kabupaten Aceh Tengah. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah masih kurangnya kualitas pelayanan administrasi di desa Arul Putih yang di jalankan pemerintahan kampung di atur dalam Qanun nomor 4 Tahun 2011. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan kabupaten aceh tengah salah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 7 (enam) orang antara lain adalah kepala desa arul putih, sekretaris desa, kepala dusun arul putih, Tokoh Masyarakat sebanyak 4(empat) orang dari Masyarakat Sipil. Implementasi Qanun No. 4 Tahun 2011, tentang pemerintahan kampung di dalam hal ini membahas tentang pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, sudah cukup baik dilaksanakan oleh pihak pemerintahan kampung. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pihak pemerintahan kampung telah melakukan sosialisasi atau penyampaian mengenai adanya kebijakan tentang pemerintahan kampung yang telah ditetapkan di aceh dan khususnya di desa Arul Putih. Meskipun kurangnya kesadaran dari pemerintahan kampung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan Qanun Nomor 4 Tahun 2011 tentang pemerintahan desa dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya kebijakan ini pemerintahan desa dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat . Untuk membantu pelaksanaan kebijakan agar tercapainya tujuan yang diharapkan masyarakat, juga telah melakukan teguran serta sanksi kepada siapa saja yang melanggar Qanun Nomor 4 tahun 2011 tentang pemerintahan kampung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

## KATA PENGANTAR



Maha suci Allah SWT yang menganugerahkan setiap orang yang menjalani hidup didunia ini yang berbeda-beda. Maha Indah karunia-Nya yang telah membekali masing-masing orang dengan potensi yang beraneka rupa. Puji dan syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena atas karunia, hidayah dan anugerah nya lah penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara Konsentrasi Kebijakan Publik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan selesainya skripsi ini dengan judul **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PEMERINTAHAN KAMPUNG DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINISTRASI BAGI MASARAKAT DI DESA ARUL PUTIH KABUPATEN ACEH TENGAH**. Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kabar gembira dan keselamatan bagi seluruh umat manusia serta membawa pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak, baik secara moril maupun materil. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

Teristimewa dan paling utama serta paling tercinta dan tersayang kepada orang tua saya tentunya yakni Ayahanda Zulkifli dan Ibunda Juniar yang telah mendukung dan membantu saya baik dari segimoril maupun materil, yang selalu mendukung dan memotivasi serta doa restu kepada saya untuk terus maju menggapai cita-cita saya. Mereka adalah sumber inspirasi dan motivasi saya dalam melangkah kedepan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi sesuai dengan syariah Islam. Karena dengan doa dan tetesan keringat merekalah saya bisa menggapai cita hari ini yang telah kudapati apa yang telah kuimpikan yang telah kutempuh dengan cucuran keringat, keyakinan, kesabaran dan doa. Mereka telah mengantarkan ku kehari depan walau esok masih menjadi tanda tanya. Musaraddin akan terus berjuang untuk menjadi manusia yang lebih baik kedepannya serta insyaallah akan berusaha menjadi anak yang dapat membanggakan orang tua serta anak mu ini akan menjaga atas apa yang telah didapatkan selama ini dengan baik. Amiinnya Allah ya Rabbalalamin.

Sebuah karya kecil ini dari perjalanan panjangku, kupersembahkan juga kepada adik-adik ku Kartini,,Lisa Maulida, Dan Bungsu Ku Suryadi, yang selalu memberikan berupa doa, semangat, motivasi kepada saya demi keberhasilanku disaat hidupku dalam menyelesaikan pendidikan saya sampai akhir penulisan skripsi ini. Ku memohon kepadamu ya Allah semoga mereka selalu dalam perlindunganmu.

Serta penulis juga mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada :

1. Bapak Dr. Agussani Drs M.Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
2. Bapak Tasrif Syam,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
3. Ibu Nalil KhairiahS.Ip M.Pd selakuKetua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
4. Bapak Drs.Dedi Amrizal M.AP selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Ananda Mahardika, S.IP, M.pd selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu dan memeberikan arahan serta waktunya.
5. Dosen serta seluruh Pegawai Staff Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Seluruh Pegawai Staff Biro yang telah banyak membantu dalam semua urusan penulis mulai dari awal perkuliahan sampai akhir pengerjaan skripsi penulis ini.
7. Bapak Kamaluddin Selaku Kepala Desa Arul Putih yang telah memberikan kesempatan waktu kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan informasinya.
8. Bapak Jalaluddin Selaku Sekertaris Desa Arul Putih, Dan Ibu Nurhayati, Bapak Ali Mustapa.,Ibu Seri Murni Dan Bapak Sabardi Mulia, selaku masyarakat sipil yang telah membantu dan memberikan informasi.

9. Bapak Perangin-Angin yang telah memberikan data dan informasi.
10. Kepada seluruh teman-teman kelasku kebijakan publik yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu serta untuk Wayudi, Muhammad Habibi, Ardi Riswan Tanjung, Fazlan Akbar, Heri Ronaldari, dedi Suryadi Aidil Pajri” Dan Seluruh Stambuk 2013 Fisip Ian mohon maaf jika nama nya tidak di sebutkan semua.
11. Kepada saudaraku satu kos asri, firman. Hartono, MustaQim, Ardinal. Herman dan Aam Ramadhan, Hari Wardana yang mendorong dalam penyelesaian pendidikanku ini.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulis duduk di perkuliahan sampai akhir dari penyelesaian skripsi ini dan semoga kita semua akan menjadi manusia yang lebih baik kedepannya.....Amiiinn.

**Medan , Agustus 2016**

**Musaraddin**

**DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Kerangka Konsep .....	29
Tabel 4.1 Struktur Pemerintahan Kampung Arul Putih .....	36

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II URAIAN TEORITIS .....</b>	<b>9</b>
1. Pengertian Kebijakan .....	9
2. Pengertian Kebijakan Publik.....	10
3. Pengertian Implementasi.....	11
4. Pengertian Implementasi Kebijakan .....	13
5. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik .....	14
6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Publik.....	16
7. Pengertian Pelayanan Publik.....	17
8. Pengertian Qanun/Perda.....	18
9. Pengertian Administarsi .....	19
10. Pengertian Administrasi Publik .....	20
11. Pengertian Pelayanan Prima.....	21
12. Pengertian Pemerintahan Kampung.....	22
13. Pengertian masyarakat.....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Teknik Pengumpulan Data.....	25
C. Definisi Konsep.....	25
D. Karegorisasi.....	28

E. Kerangka Konsep .....	28
F. Teknik Analisis Data .....	30
G. Narasumber .....	30
H. Lokasi Penelitian.....	31
I. Deskripsi Lokasi penelitian .....	31
J. Struktur Pemerintahan Kampung.....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
A. Hasil Penelitian .....	48
B. Pembahasan.....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sesuai Qanun Nomor 4 tahun 2011 tentang pemerintahan kampung.

Pemerintahan kampung merupakan Badan Perwakilan desa tampil sebagai lembaga yang terpisah dari kekuasaan eksekutif dan legislatif, berperan sebagai badan pengawas dan kontrol terhadap pemerintah desa mewakili masyarakat. Badan yang beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat ini menampung aspirasi masyarakat untuk kemajuan dan kesejahteraan desa dan masyarakat yang disesuaikan dengan keterwakilan wilayah yang ditetapkan melalui cara musyawarah dan mufakat. Peranan legislasi dilakukan bersamaan dengan Pemerintah Desa dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa. Dengan demikian penerapan nilai-nilai demokrasi memang harus dilakukan dan sangat penting dalam kemajemukan masyarakat Indonesia.

Otonomi desa diakui secara nyata sehingga menjadi daerah yang bersifat istimewa dan mandiri, memiliki identitas sendiri. Secara administratif desa berada di bawah Pemerintahan Kabupaten, hal ini sesuai dengan Pasal 200 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa dalam sistem pemerintahan daerah, desa merupakan desentralisasi dari sistem pemerintahan.

Peraturan Daerah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa Pemerintah Desa menyelenggarakan pemerintahan dan mengelola segala urusan sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa proses demokratisasi telah bergulir sampai pada tingkat Pemerintahan Desa. Proses demokratisasi pada tingkat Pemerintahan Desa merupakan fenomena yang sangat menarik dan strategis, karena dalam konteks ini aparat desa tidak secara mutlak menjadi satu-satunya agen pelaksana pemerintahan, tetapi ada lembaga lain yaitu Badan Perwakilan Desa (BPD) yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan pemerintahan.

Pemerintah kampung dalam menjalankan pemerintahannya merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintah daerah, yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Adapun upaya ini untuk memperbaiki sistem pemerintahan desa dalam sistem kepengurusan dalam penyeleggaraan pemerintahan kampung. sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011.

Pemerintahan kampung adalah penyeleggaraan urusan pemerintah oleh unsur sarak opat atau empat unsur atau kepala desa,sekertaris desa, pengulu,badan permusyawaratan desa atau (BPD). Dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan ripublik indonesia sesuia dengan Qanun Nomor 4 Tahun 2011.

Berdasarkan tugas dan fungsinya pemerintahan kampung adalah kepala desa dan perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.

Adapun fungsi pemerintahan kampung adalah:

1. Menyelenggarakan pemerintahan secara otonom berdasarkan asas otonomi yang bersipat asal usul asas desentralisasi maupun tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada dikampung.
2. Pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi secara berkeadilan dikampung.
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan syariat islam.
4. Pembinaan dan fasilitasi kemasarakatan dibidang pendidikan, peradaban, sosial budaya, kerukunan hidup antar warga masarakat, perlindungan hak-hak masyarakat, ketentraman dan ketertiban masarakat.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
6. Pelestarian adat-istiadat yang ada dikampung.
7. Penyelesaian persengketaan dalam hal adanya pelanggaran syariat islam, perkara adat dan tindak pidana ringan.

Adapun dari beberpa fungsi yang tidak teraksanan yang termasuk pelayanan adalah:

Dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat pemerintahan kampung merupakan salah satu tempat untuk menerima aspirasi masyarakat dimana masyarakat desa mempunyai hak untukdiberi pelayanan yang sesuai dengan ketetapan pemerintah.Dengan demikian pemerintahan kampung harus

memberikan pelayanan secara merata bagi masyarakat desa yang ingin diberi pelayanan dalam bentuk surat. Contoh pembuatan Ektp, kk, surat tanah dan surat penting lainnya. Memang bukan pemerintahan kampung yang langsung membuat hal tersebut tetapi dengan adanya surat yang dikeluarkannya secara resmi dari pemerintahan kampung maka instansi pemerintahan yang terkait tidak akan keberatan dalam mengeluarkan surat tersebut yang berdasarkan surat tertulis yang resmi dari pemerintahan kampung.

Banyaknya permasalahan yang terjadi di desa Arul Putih kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah yang Menjadi persoalan masyarakat desa Arul Putih adalah kurangnya pelayanan administrasi yang diberikan oleh pemerintahan kampung terhadap masyarakat desa dikarenakan kurangnya komunikasi antara kepala desa dan aparat-aparat desa sehingga masyarakat yang berkeperluan merasa bingung dengan kinerja pemerintahan kampung yang seharusnya dapat memberi pelayanan dengan baik. karena komunikasi antara kepala desa dengan aparat-aparat yang masih kurang jadi mereka saling mengalihkan tugas dan fungsi mereka sebagai pemerintahan kampung dalam hal keperluan umum termasuk pelayan administrasi. Maka masyarakat merasa bingung dan merasa tidak dilayani oleh pemerintahan kampung dalam melakukan kepengurusan surat dan hal lainnya. kurangnya sarana dan prasarana sehingga proses pelayanan terhambat tidak berjalan efektif dan maksimal. sehingga tidaksesuia dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari proses pelayanan administrasi yang diberikan oleh pemerintahan kampung dalam pembuatan surat-menysurat yang masih bertele tele dan lambat untuk memperoleh keperluan

administrasi. sehingga masyarakat kurang puas dengan pelayanan yang diberikan pemerintahan kampung.

Dalam upaya pemberian pelayanan yang seharusnya sesuai dengan Qanun yang berlaku tentang fungsi dan tugas pemerintahan kampung dalam hal melayani masyarakat desa. pemerintahan kampung diharapkan dapat memberikan pelayanan maksimal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk Qanun Nomor 4 tahun 2011 tentang pemerintahan kampung bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan desa yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku dalam memberikan pelayanan administrasi yang maksimal terhadap masyarakat.

Melihat pelayanan administrasi pemerintahan dikampung di desa Arul Putih Kabupaten Aceh Tengah dengan adanya Qanun Nomor 4 tahun 2011 maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Administrasi Masyarakat Di Desa Arul Putih Kabupaten Aceh Tengah”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Menurut Dunn (2003:26) masalah adalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah yang memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda (agenda setting).

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan sehingga penelitian dapat terarah dalam membahas masalah yang akan diteliti, mengetahui arah batasan penelitian serta meletakkan pokok yang akan dikaji (dibahas) dalam suatu penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat difokuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Administrasi Masyarakat di Desa Arul Putih Kabupaten Aceh Tengah.
2. Kendala kendala apa saja yang menghambat pemerintahan kampung dalam memberikan pelayanan administrasi terhadap masyarakat.
3. Apakah upayapemerintahan kampung dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat desa Arul Putih kabupaten aceh tengah.

### **C. Tujuan dan Manfaat penelitian**

#### **a. Tujuan Penelitian.**

1. Untuk mengetahui implementasi Qanun Nomor 4 tahun 2011 tentang pemerintahan kampung dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi masyarakat di desa Arul Putih Kabupaten Aceh Tengah.
2. Untuk mengetahui upaya pemerintahan kampung dalam meningkatkan pelayanan administrasi yang ada di desa Arul Putih.
3. Agar penelitian ini bermanfaat bagi kepentingan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai refrensi serta dapat berguna bagi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan kampung di desa Arul Putih Kabupaten Aceh Tengah.

b. Manfaat Penelitian.

1. Untuk melatih penulis dan mengembangkan wawasan fikiran secara ilmiah dan rasional dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul dilingkungan masyarakat.
2. Agar penelitian ini bermanfaat bagi kepentingan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai refrensi serta dapat berguna bagi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan kampung di desa Arul Putih Kabupaten Aceh Tengah.
3. Di harap kan penelitian ini dapat memberikan sumbanagan fikiran dalam meningkatkan pelayanan administrasi yang sesuai dengan Qanun Nomor 4 Tahun 2011 tentang pemerintahan kampung.

**D. SITEMATIAK PENULISAN**

Adapun yang menjadi sitematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Terdiri dari : Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

**BAB II : URAIAN TEORITIS**

Pada Bab ini menjelaskan Tentang Pengertian kebijakan, pengertian kebijakan publik, pengertian Implementasi, pengertian implementasi kebijakan, pengertian implementasi kebijakan publik, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan, pengertian pelayanan publik, pengertian Qanun (perda), pengertian

administrasi, pengertian administrasi publik, pengertian pelayanan prima, pengertian pemerintahan kampung, pengertian masyarakat.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang jenis Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Defenisi Komsep, Kategorisasi, Krangka Konsep, Teknik Analisis Data, Narasumber, Teknik Objek Penelitian.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada Bab ini memuat tentang penyajian Hasil data yang diperoleh dari lapangan sehingga peneliti dapat memeberikan interprestasi atas permasalahan yang diteliti

### **BAB V : PENUTUP**

Pada Bab ini menerangkan tentang Kesimpulan dan Saran dari semua hasil yang diteliti.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

Pada suatu penelitian, teori merupakan hal yang sangat penting guna menganalisis permasalahan yang akan diteliti. Pengertian teori menurut Koentjaraningrat adalah teori merupakan pernyataan mengenai sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif mengenai gejala-gejala yang diteliti atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat.

Dari uraian tersebut maka untuk mengangkat suatu masalah terlebih dahulu mengenal teori yang akan digunakan dalam penelitian, sehingga pada penelitian akan dapat menarik kesimpulan yang dapat memberikan suatu pemecahan masalah yang mempunyai nilai tertentu.

#### **1. Pengertian Kebijakan**

Secara etimologi, istilah *policy (Kebijakan)* berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta dan Latin. Akar kata *policy* dalam bahasa Yunani dan Sanskerta yaitu polis (*Negara-Kota*) dan pur (*Kota*) yang kemudian dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi *politia (Negara)* dan pada akhirnya dalam bahasa Inggris pertengahan adalah *policie*, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan.

Menurut Friedrich (2007:07) kebijakan adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seseorang atau sekelompok atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang, terhadap pelaksanaan usulan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Sementara Knoepfel (2007:9) mengartikan kebijakan publik adalah serangkaian keputusan atau tindakan-tindakan sebagai akibat dari intraksi terstruktur dan berulang diantara berbagai aktor, baik publik/pemerintah maupun privat/swasta yang terlibat berbagai cara dalam merespons, mengidentifikasi, dan memecahkan suatu masalah yang secara politis didefinisikan sebagai masalah publik.

Menurut Budiardjo (2000:12) menyatakan kebijakan adalah suatu kumpulan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kepala politik dalam usaha memilihtujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah rangkaian pedoman atau konsep dan asas yang menjadi acuan dalam pelaksanaanya dalam rangka pencapaian tujuan tertentu yang dicirikan oleh prilaku yang konsisiten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya.

## **2. Pengertian Kebijan Publik**

Segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah terhadap kepentingan publik, baik disegi pembangunan, perekonomian, perdagangan, politik, dan lain-lainya hal-hal yang dilakukan seperti ini tujuan untuk sebuah yang lebih baik kedepannya dibandingkan sebelumnya.

Udoji (2006:81) mendefenisikan kebijakan publik adalah suatu tindakan bersangsi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi bagian besar warga masyarakat.

Subarsono (2005:17) Mengatakan kebijakan publik adalah kebijakan yang ditetapkan oleh badan dan aparat pemerintah:

Dye (1978:1) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah: *whatever governments choose to do or not to do* (pilihan tindakan apapun apa yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah).

Richard (1969:79) mengemukakan kebijakan publik sebagai rangkaian kegiatan panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan.

Menurut Jenkins (1978:15) merumuskan kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

Berdasarkan pendapat diatas maka penulis membuat kesimpulan bahwa kebijakan publik itu merupakan beberapa pilihan kebijakan yang berhubungan dengan permasalahan masyarakat yang kebijakan tersebut dibuat oleh badan-badan pemerintah.

### **3. Pengertian Implementasi**

Menurut Nurdin (2002:70) implementasi adalah bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktifitas, tetapi sesuatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Hanifah (2002:57) implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam

administrasi pengembangan kebijakan dalam rangka menyempurnakan suatu program.

Menurut Guntur (2004:39) implementasi adalah suatu perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses intraksi antara tujuan dan tindakan untuk dicapai serta memerlukan jaringan pelaksana.

Mazmanian (1981:7) menjelaskan makna implementasi ini adalah memahami dengan senyatanya terjadi sesuatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian atau kesgiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan. Negara, yang mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Jadi Implementasi adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan suatu kebijakan secara efektif. Implementasi ini merupakan pelaksanaan aneka ragam program yang dimaksudkan dalam sesuatu kebijakan. Ini adalah satu aspek proses kebijakan yang amat sulit untuk menentukan hasil dari kebijakan tertentu.

Dengan adanya program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasikan dan yang harus dipenuhi dalam proses implementasi yaitu adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program sehingga masyarakat tersebut akan menerima manfaat dari program yang dijalankan serta terjadinya perubahan dan peningkatan dalam kehidupan tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat maka bisa dikatakan bahwa program tersebut gagal dilaksanakan.

Berhasil atau tidaknya suatu program diimplementasikan tergantung dari unsur pelaksanaannya implementasi memiliki arti penting baik dalam organisasi maupun perorangan karena implementasi bertanggung jawab dalam pengelolaan maupun pengawasan dalam proses implementasi kegagalan atau keberhasilan implementasi juga dapat dilihat dari kemampuan pembuatan kebijakan dalam mengoperasionalkan program-program. Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam pelaksanaannya.

#### **4. Pengertian Implementasi Kebijakan**

Menurut Wahab (1991:45) mengatakan implementasi merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi tidak hanya bersangkutan dengan penjabaran-penjabaran- keputusan politik dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi melainkan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Menurut Wahab (1991:123) mengatakan bahwa fungsi implementasi kebijakan adalah suatu yang berhubungan yang memungkinkan tujuan-tujuannya atau sasaran kebijakan di wujudkan sebagai *out come* (hasil ahir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah. Sebab itu fungsi implementasi mencakup pula penciptaan yang dalam ilmu kebijakan negara tersebut *policy delivery sitem* (sistem penyampaian/penerusan kebijakan negara) yang biasanya terdiri dari cara-cara sarana tertentu yang di rancang/didesain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sarana-sarana yang dikehendaki.

Anderson (1992:93) mengemukakan implementasi kebijakan merupakan tahapan dan proses kebijakan. Anderson menetapkan bahwa implementasi

pelaksanaan merupakan penerapan kebijaksanaan atau mesin administratif pemerintah untuk memecahkan masalah-masalah politik.

Dari penjelasan diatas fungsi implementasi kebijakan adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijaksanaan Negara yang diwujudkan sebagai *out come* atau hasil akhir. Implementasi mencakup apa yang dalam ilmu kebijaksanaan disebut dengan *policy delivery system* atau sistem penyampaian kebijaksanaan.

## **5. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Tangkilisan (2003:11) mengatakan implementasi kebijakan adalah tahap pembuat keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya pasal sebuah undang-undang legislatif, penegeluaran sebuah peraturan-peraturan eksekutif, persoalan keputusan pengadilan atau keluarnya standart peraturan dan berkonsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupannya.

Menurut agustino (2006:139) mengatakan implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan kebijaksanaan dasar. Biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mendefenisikan masalah yang ingin diatasi menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan dan mengatur proses implementasi.

Winarno (2002:102) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan mencapai tujuan-tujuan

yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan mulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Menurut majone (1978:8) mengatakan implelementasi kebijakan pulik adalah cara pada individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi berintraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya.

Anderson ( 1992 :92) memberikan definisi kebijakan publik dalam bukunya mengatakan sebagai berikut Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Konsep kebijakan ini menitik beratkan dengan apa yang sesungguhnya yang dikerjakan dari pada apa yang diusulkan atau dimaksud. Dan inilah yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan dari beberapa alternatif yang ada.

Menurut Pressman dan Wildavski (1979:5) Implementasi kebijakan publik adalah menjadikan orang melakukan apa-apa yang diperintahkan dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah sistem dan pengembangan sebuah program kontrol yang meminimalkan konflik dan deviasi dari tujuan yang telah ditetapkan.

Solichin (1991:45) mengatakan implementasi kebijakan adalah aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan implementasi tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu, ini menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses untuk memberlakukan baik berbentuk undang-undang, peraturan-peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Serta sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang diarahkan demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

## **6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Publik**

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik adalah sangat ditentukan oleh adanya perubahan dalam seseorang yang menghendaki suatu tujuan dalam kesepakatan bersama untuk mencapai apa yang menjadi tujuan bersama.

Edward (1980:178) mengidentifikasi 4 faktor yang mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung dalam mengimplementasikan kebijakan publik :

- 1) communication (*Komunikasi*). Dalam pengimplementasikan diperlukannya komunikasi baik antara sesama pembuat kebijakan maupun yang ditujukan kebijakan.
- 2); resources ( *Sumber Daya*). Implementasi kebijakan tidak akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan jika kekurangan sumber daya baik yang menyangkut sumber daya manusia, maupun dana dan fasilitas.
- 3); disposition (*Sikap Implementor*). Implementasi akan terlaksana dengan baik jika

pengimplementasiannya bersikap baik atau sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab dalam pelaksanaannya. 4); *reducratis structure (struktur Birokrasi)*. Meskipun sumber daya telah tersedia, implementor sudah tau apa yang harus dilaksanakannya atau memahami fungsi dan tugasnya, namun pelaksanaan masih dihadapkan dengan struktur birokrasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan.

Selain itu, Meter (1978:166) menurut mereka ada beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan publik, antara lain :1) kompetensi dan ukuran staf suatu badan.2); Tingkat pengawasan hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub-unit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana.3); sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan diantara anggota-anggota legislative dan eksekutif). 4); Vitalitas suatu organisasi. 5); tingkat komunikasi terbuka, yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu diluar organisasi. 6); Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

## **7. Pengertian Pelayanan Publik**

Sedangkan Lewis dan Gilman (2005:22) mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut: pelayanan publik adalah kepercayaan publik. Warga negara berharap pelayanan publik dapat melayanani dengan kejujuran dan pengelolaan sumber penghasilan secara cepat, dan adapat dipertanggung jawabkan kepada publik.

Menurut Ridwan dan Sudrajat (2009:103), mengatakan Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan.

Standar pelayanan adalah ukuran yang diberlakukan dalam penyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. Adapun standar pelayanan yakni meliputi sebagai berikut:

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelayanan yang diperlukan manusia pada dasarnya terbagi atas dua jenis, yaitu layanan fisik yang sifatnya pribadi serta layanan administratif yang diberikan orang lain selaku anggota organisasi atau organisasi massa atau organisasi negara. Berdasarkan pendapat tersebut yang dimaksud dengan pelayanan adalah kegiatan yang berkesinambungan dalam kehidupan sehari-hari yang berupa layanan fisik yaitu bersifat pribadi dan administratif yang biasa terdapat pada suatu kegiatan organisasi

## **8. Pengertian Qanun (Perda)**

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh mendefinisikan Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dengan peraturan daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Qanun Kabupaten ialah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dikehidupan masyarakat di Kabupaten.

## **9. Pengertian Administrasi**

Nawawi (2003:12) mengatakan Administrasi adalah rangkaian kegiatan atau proses pengendalian cara atau system kerjasama sejumlah orang agar berkelangsung efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan bersama.

Siagian (2011:267) mengatakan administrasi dalam arti sempit berkisar pada berbagai kegiatan ketatausahaan. Kegiatan-kegiatan ketatausahaan merupakan bagian yang sangat penting dari kegiatan organisasi terutama sarana kegiatan tersebut menyangkut penanganan informasi yang dikatakan berperan sebagai *darah*. Bagi suatu organisasi. Dalam pengertian yang demikian administrasi biasanya hanya dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan ketatausahaan yang mencakup korespondensif, kesekretaritan, penyusunan laporan dan kearsipan. Sedangkan dalam arti luas berarti keseluruhan proses penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang didasarkan pada rasional tertentu oleh dua orang atau lebih dalam rangka dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan sarana dan prasarana tertentu.

Suprayogi (1993: 132) mengatakan administrasi adalah dua orang atau lebih yang bersatu guna mencapai tujuan secara bersama-sama.

Meskipun demikian, administrasi publik bukan sekedar teknik atau pelaksanaan program-program secara teratur, melainkan juga berkenaan dengan kebijakan umum *Policy* karena didalam dunia modern, birokrasi merupakan pembuat kebijakan pokok didalam pemerintahan.

Adapun kesimpulan dari administrasi yang diatas adalah rangkaian kegiatan (proses) usaha kerja sama kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. Karena kerja sama tersebut harus ada wadahnya, yaitu organisasi, batasan lengkap tentang administrasi adalah rangkaian kegiatan (proses) usaha kerja sama sekelompok orang dalam wadah organisasi mencapai tujuan secara efisiensi.

#### **10. Pengertian Administrasi Publik**

Inu kencana syafii (1999:120) mengatakan administrasi adalah suatu proses yang umumnya ada pada usaha kelompok-kelompok baik pemerintah, swasta, sipil maupun militer baik urusan besar dan urusan kecil.

Waldo (2003:17) mengatakan administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.

Keban (2008:4) mengatakan bahwa istilah administrasi publik menunjukkan bagaimana pemerintah beroperasi sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai legislator yang aktif yang selalu berinisiatif dalam mengatur dan mengambil langkah dan prakarsa yang menurut mereka penting dan baik buat masyarakat yang diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu dan harus tunduk menerima apa saja yang diatur pemerintah.

Syafri (2012:21) mengatakan administrasi publik adalah segala urusan atau praktik urusan pemerintah karena tujuannya pemerintah adalah melaksanakan pekerjaan publik secara efisien dan sejauh mungkin sesuai dengan selera dan keinginan rakyat, dalam administrasi publik pemerintahan berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak dapat ataupun tidak dipenuhi oleh usaha privat atau swasta.

Dengan demikian rumusan administrasi publik/negara adalah proses kerja sama kelompok orang atau terdiri dari aparatur negara, anggota legislatif, partai politik, lembaga swadaya masyarakat/LSM, kelompok kepentingan, organisasi profesi, media massa, atau masyarakat sipil lain dalam merumuskan, mengimplementasikan (melaksanakan) berbagai kebijakan dan program untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pencapaian tujuan secara efisien dan berkeadilan sosial.

## **11. Pengertian Pelayanan Prima**

### **1. Hakekat dan pengertian pelayanan prima**

Pada hakekatnya pelayanan prima adalah salah satu usaha yang dilakukan suatu perusahaan untuk melayani pembeli atau pelanggan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan pelanggan, baik berupa produk, barang, dan jasa.

Secara sederhana pelayanan prima *excellent service* dapat diartikan sebagai suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan dengan kata lain pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standart kualitas. Pelayanan yang memenuhi standar dan kualitas adalah sesuatu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan /masyarakat.

Dalam pelayanan terdapat dua elemen yang saling berkaitan pelayanan dan kualitas perlu diketahui bahwa kemajuan yang dicapai oleh suatu negara tercermin dari standar pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyatnya. Terdapat beberapa definisi tentang kualitas pelayanan yang dikemukakan oleh para ahli, dan dari definisi tersebut terdapat beberapa kesamaan yaitu antara lain: a); kualitas merupakan usaha memenuhi harapan pelanggan. b); kualitas merupakan kondisi mutu yang setiap saat mengalami perubahan. c); kualitas itu mencakup proses, produk, barang, jasa, manusia, dan lingkungan. d); kualitas merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.

2. Tujuan pelayanan prima: a); untuk memberikan mutu kepada pelanggan. b); untuk menciptakan kepercayaan dan kepuasan kepada pelanggan. c); untuk menjaga pelanggan merasa diperhatikan segala kebutuhannya. d); untuk mempertahankan pelanggan.
3. Fungsi pelayanan prima: a); melayani pelanggan dengan ramah, cepat, dan tepat. b); menciptakan agar suasana agar pelanggan merasa diperhatikan. c); menepatkan pelanggan sebagai mitra usaha. d); memenangkan persaingan pasar.

## **12. Pengertian Pemerintahan Kampung**

Menurut Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 tahun 2011 Pemerintahan kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh sarak opat dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang dihormati dan diakui negara kesatuan republik Indonesia.

### **13. Pengertian Masyarakat**

Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dengan dan mempunyai kepentingan bersama seperti sekolah keluarga perkumpulan dan lain-lain.

Menurut Koentjaraningrat (1974) masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Jenis Penelitian**

Dalam menentukan metode penelitian, terlebih dahulu perlu kita ketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas dalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara, menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Menurut Furchan (1992:21) Mengatakan bahwa diskriptif dapat dilihat sebagai indikator berbagai norma-norma dan nilai-nilai kelompok serta kekuatan sosial lainnya yang menyebabkan atau perilaku manusia.

Sedangkan metode kualitatif dikemukakan oleh Furchan (1992:21) Adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni: ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang atau subjek itu sendiri.

Dengan demikian penelitian ini akan memberikan gambaran tentang implementasi kebijakan Qanun Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Administrasi masyarakat Kampung Arul Putih Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan fakta-fakta yang ada dan mencoba menganalisis kebenaran data yang diperoleh.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Agar penelitian ini dapat mencapai hasil yang maksimal maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### a) Data Primer

Mengamatan atau *Observasi* yaitu mengadakan langsung ke objek penelitian untuk mengamati secara dekat masalah yang dihadapi wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang melakukan tanya jawab secara lisan kepada dua orang atau lebih dalam menggali informasi dengan tatap muka secara langsung untuk memperoleh keterangan dari narasumber yang berperan dari masalah yang diteliti.

### b) Data Skunder

Merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti mempelajari literatur, buku-buku, dokumen-dokumen, maupun catatan yang relevan dengan masalah yang diteliti.

## 1. Defenisi Konsep

Nawawi (1995:43) mengemukakan konsep adalah istilah atau defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.

Defenisi konsep merupakan penjabaran tentang konsep-konsep yang telah dikelompokkan kedalam variabel agar lebih terarah. Jadi, jelasnya defenisi konsep dimaksud untuk merubah konsep-konsep yang berupa dengan konstitusi dengan kata-kata yang mengemukakan prilaku atau gejala yang ditemukan oleh orang lain kebenarannya.

Dari uraian diatas digunakan konsep pemikiran untuk mempersempit pengertian yang akan diteliti:

- a. Kebijakan adalah strategi seseorang atau sekelompok orang yang mencapai tujuan dan cita-cita yang diinginkan.
- b. Kebijakan Publik merupakan studi tentang bagaimana, mengapa, dan apa efek dari tindakan aktif *action* dan pasif *in action* pemerintah dalam strategis mencapai tujuan.
- c. Implementasi adalah aktifitas-aktifitas yang dilakukan untuk melaksanakan suatu kebijakan secara efektif.
- d. Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan tersebut.
- e. Implementasi Kebijakan Publik adalah untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu.
- f. Pelayanan Publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peningkatan pelayanan publik yang efisien dan efektif akan mendukung tercapainya efisiensi dan efektif akan mendukung tercapainya efisiensi pembiayaan, artinya ketika pelayanan umum yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan kepada pihak yang dilayani berjalan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau mekanisme atau prosedurnya tidak

berbelit-belit, akan mengurangi biaya atau beban bagi pihak pemberi pelayanan dan juga penerima pelayanan.

- g. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.
- h. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
- i. Administrasi Publik adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara.
- j. Pelayanan Prima adalah pelayanan terbaik yang diberikan perusahaan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan, baik pelanggan didalam perusahaan maupun diluar perusahaan.
- k. Pemerintahan Kampung adalah penyeleggaraan urusan pemerintah oleh unsur sarak opat dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan ripublik indonesia
- l. Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.

## **2. Kategorisasi**

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisa dari variabel tersebut.

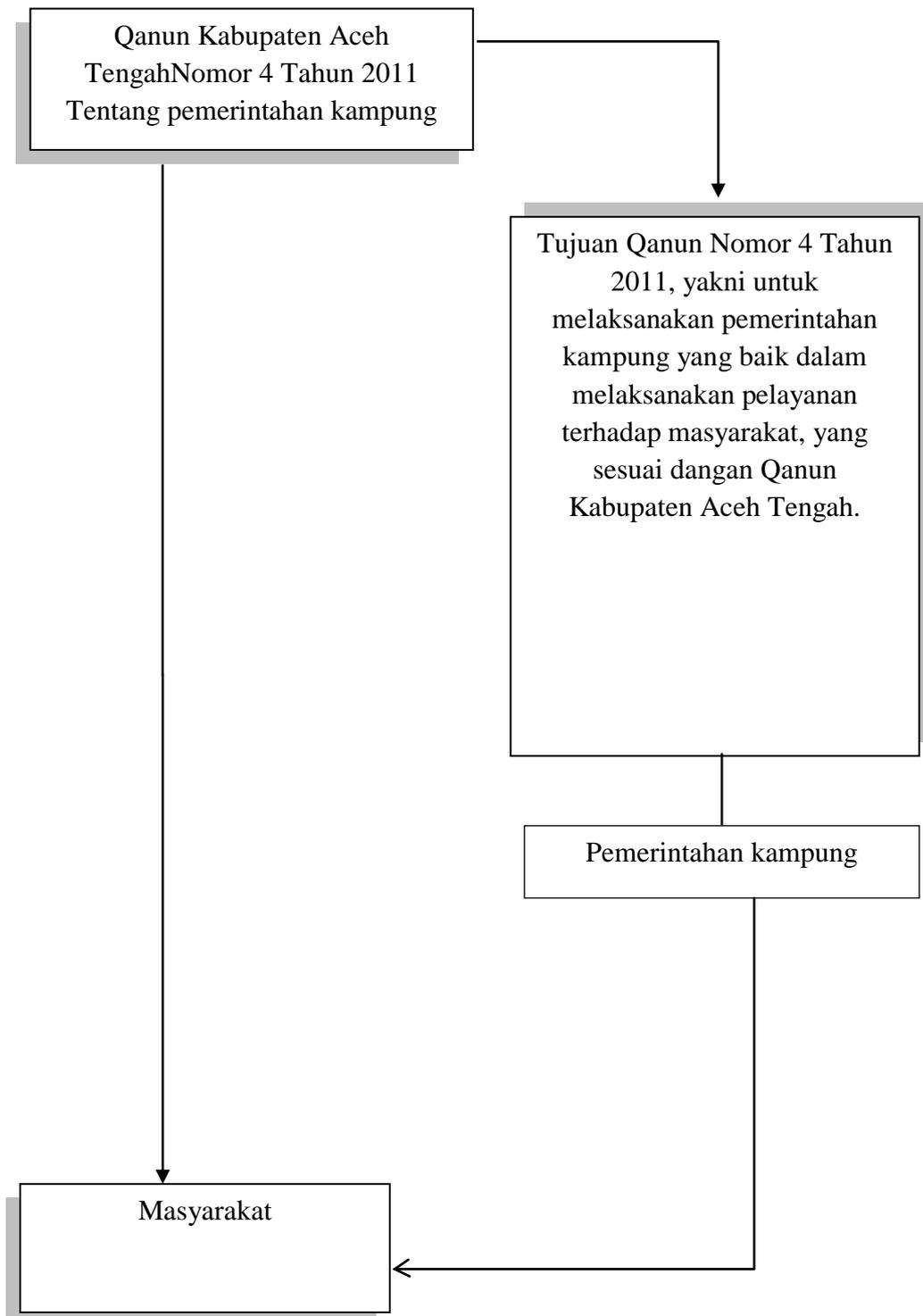
Adapun yang menjadi kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya tujuan yang ingin dicapai.
2. adanya mekanisme perintah dan control dari pimpinan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan publik.
3. Adanya prosedur prosedur yang dilakukan.
4. adanya interaksi antara pemerintah dan masyarakat.

### **Krangka Konsep**

Nawawi ( 1995 : 43 ) menyatakan bahwa kerangka konsep itu disusun sebagai perkiraan teoritis dari hasil yang akan dicapai setelah dianalisis secara kritis berdasarkan persepsi yang dimiliki.

Dari uraian teoritis diatas, maka dapat kita kembangkan bahwa kerangka konsep dapat digambarkan dalam sebuah model teoritis seperti yang dibawah ini.



**Tabel 3.1 kerangka konsep**

## 1. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data dan kemudian akan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

Sedangkan teknik analisis data menurut Moleong (2006:239) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola kategorisasi dan satuan uraian dasar. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data kemudian akan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang diuraikan secara deskriptif.

## 2. NARASUMBER

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti dan orang yang berkompeten atau yang mengetahui informasi tentang implementasi pelaksanaan kebijakan tentang pemerintahan Kampung di Desa Arul Putih Kabupaten Aceh Tengah.

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, maka dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah:

A. Dua pihak dari perangkat kampung sara kopat di desa Arul Putih kabupaten Aceh Tengah.

- 1) Bapak Kamaluddin (Kepala Desa Arul Putih)
- 2) Bapak Jamaluddin (Sekertaris Kampung Arul Putih)
- 3) Bapak Usman Kari (Kepala Dusun)

B. Empat dari masyarakat yang menerima pelayanan di desa Arul Putih kabupaten Aceh Tengah.

- 1) Ibu Nurhayati (Masyarakat Desa Arul Putih)
- 2) Bapak Sabardi Mulya (Masyarakat Desa Arul Putih)
- 3) Ibu Seri Murni (Masyarakat Desa Arul Putih)
- 4) Bapak Ali Mustafa (Masyarakat Desa Arul Putih)

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dikantor reje kampung atau kepala desa di desa Arul Putih, kabupaten aceh tengah Jalan arul kumer-pa angkup aceh tengah.

#### 1). Diskripsi lokasi penelitian

##### A. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Tengah

Aceh Tengah merupakan salah satu kabupaten yang terletak ditengah-tengah Provinsi Aceh. Secara geografis Kabupaten Aceh Tengah berada pada posisi antara 4010"-4058" LU dan 96018" - 96022" BT. Wilayahnya yang seluas 431.839 Ha atau setara dengan 4.318,39 Km<sup>2</sup>, berbatasan langsung dengan Kabupaten Bener Meriah dan Bireuen di sebelah utara, Kabupaten Gayo Lues disebelah selatan, Kabupaten Nagan Raya dan Pidie disebelah barat, serta Kabupaten Aceh Timur disebelah timur.

Secara administrative, wilayahnya terbagi menjadi 14 kecamatan yang meliputi 269 desa/ kampung defenitif dan 27 kampung persiapan. Pada Triwulan I tahun 2011, jumlah penduduknya mencapai 202.114 jiwa dengan kepadatan rata-rata 47 jiwa/Km<sup>2</sup>. Keadaan penduduk berdasarkan suku bangsa, Kabupaten Aceh Tengah merupakan daerah yang majemuk dengan komposisi penduduk bersuku Gayo ± 60%, suku Jawa 30%, Aceh Pesisir 5%, dan sisanya merupakan

suku lainnya seperti Batak, Padang, Cina, dsb dengan mayoritas penduduk beragama Islam yakni sebanyak 97%. Mata pencaharian penduduknya didominasi oleh kegiatan pertanian dengan tenaga kerja sebesar 80%, disusul lapangan pekerjaan disektor perdagangan sebanyak 8%, sektor jasa sebesar 5% dan sektor lainnya sebesar 7%. Berikut disajikan data Penduduk Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan kecamatan Tahun 2008.

Kabupaten Aceh Tengah memiliki topografi wilayah bergunung dan berbukit dengan ketinggian rata-rata bervariasi antara 200 – 2.600 meter diatas permukaan laut. Penggunaan lahannya didominasi oleh kawasan hutan seluas 280.647 Ha atau 64,98% dari luas wilayah, dan sisanya berupa tanah bangunan, sawah, tegal/ kebun, lading/huma, padang rumput, rawa-rawa, kolam, tambak, perkebunan dan areal peruntukan lainnya.

Pada umumnya jenis tanahnya bervariasi, 68% diantaranya terdiri dari tanah podsolik coklat dan merah kuning dengan tekstur liat berpasir, struktur remuk, konsistensi gembur permeabilitas sedang. Keadaan tersebut menjadikan Aceh Tengah sebagai daerah yang subur dan menjadi pusat produksi hasil pertanian dataran tinggi di Provinsi Aceh. Sesuai dengan letak geografisnya, iklimnya termasuk iklim equatorial, dengan jumlah hari hujan rata-rata 137 hari/tahun dan curah hujan rata-rata 1.822 m/tahun. Suhu udara rata-rata berkisar pada 20 derajat celcius dengan kelembaban nisbi antara 80 – 84%.

Kabupaten ini memiliki sebuah Danau yang diberi nama Danau Laut Tawar. Danau tersebut dikelilingi oleh perbukitan yang ditumbuhi pohon Pinus Merkusi. Luas Danau ini sekitar 5.472 Ha dengan air yang bersumber dari sejumlah mata air dan 21 buah sungai kecil termasuk sebuah sungai besar

”Krueng Peusangan” yang saat ini sedang akan dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian Kabupaten Aceh Tengah terus mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Pada tahun 2010, income perkapita sebesar Rp. 5,27 juta atau setara US\$ 620 (asumsi 1US\$ = Rp. 8.550) dan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6,02 persen per tahun.

Pemberdayaan masyarakat harus pula selaras dengan perkembangan pelaksanaan otonomi daerah, sehingga yang terjadi adalah betul-betul kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan masyarakat, yang pada akhirnya menunjang keberhasilan pembangunan daerah disemua sektor termasuk bidang ekonomi. Oleh karena itu, pola pengembangan masyarakat haruslah diprogramkan berdasarkan kondisi geografis, demografis dan potensi daerah karena akan memanfaatkan sumber daya lokal dan mampu merangsang pertumbuhan usaha lokal serta optimalisasi pemanfaatan lahan.

Untuk Kabupaten Aceh Tengah, potensi daerah berdasarkan kondisi geografis dan demografis terdiri atas beberapa sector; diantaranya Sektor Perkebunan, Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Sektor Peternakan, Sektor Perikanan, Sektor Kehutanan, Sektor Pertambangan dan Energi, Sektor Industri dan Sektor Pariwisata.

## **B. Gambaran Umum Kantor Kepala Desa Arul Putih**

Arul Putih suatu desa yang berada di kecamatan Silih Nara, kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh. Desa Arul Putih merupakan desa hasil pemekaran dari desa Arul Kumer sekitar Tahun 1990. Dimana kawasan desa arul putih berbatasan dengan desa dibagian timur, berbatasan dengan desa Arul Kumer,

dibagian barat, berbatasan dengan desa Penyo, dibagian utara, berbatasan dengan desa Linge Tareng, dan dibagian selatan, berbatasan dengan desa Semelit Mutiara. Desa Arul Putih memiliki luas sekitar 15 hektar dengan jumlah penduduk berkisar 200 kepala keluarga atau sekitar 1100 jiwa, dengan penghasilan rata-rata dari bertani. Setelah di mekarkan oleh desa Arul Kumer, desa Arul Putih sudah beberapa kali pergantian kepala desa, dari Tahun ke Tahun pembangunan pemukiman penduduk, infrastruktur, sarana dan prasarana, seperti masjid, sekolah, menasah, termasuk kantor desa Arul Putih, dan lain-lain seiring dengan bergantinya waktu. Adapun fungsi kantor desa yang berada didesa Arul Putih untuk menjalankan segala hal kepentingan umum, dan dalam meberikan pelayanan terhadap masyarakat desa yang dijalankan oleh pemerintahan desa, baik itu Kepala desa, Sekertaris, Imem, Petue, Rakyat genap mupakat(RGM) untuk menjalan fungsinya masing-masing.

#### A. Visi

Terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat kampung.

#### B. Misi

1. Melanjutkan kualitas peningkatan syariat islam.
2. Melakuan pemantapan sarana dan prasnana penujung pemerintahan.
3. Melanjutkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan infrastruktur lainnya.

### **C. Kedudukan (Kampung)**

Kampung merupakan organisasi terendah yang berada dibawah kecamatan dalam struktur organisasi Pemerintahan Kabupaten.

### **D. Tugas pemerintahan kampung**

Pemerintahan kampung mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan secara otonom, melaksanakan pembangunan, melestarikan adat-istiadat, memanfaatkan sumber daya alam, membina kerukunan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan kualitas pelaksanaan syariat islam, serta memelihara kehormatan dan warganya.

### **E. Pungsi**

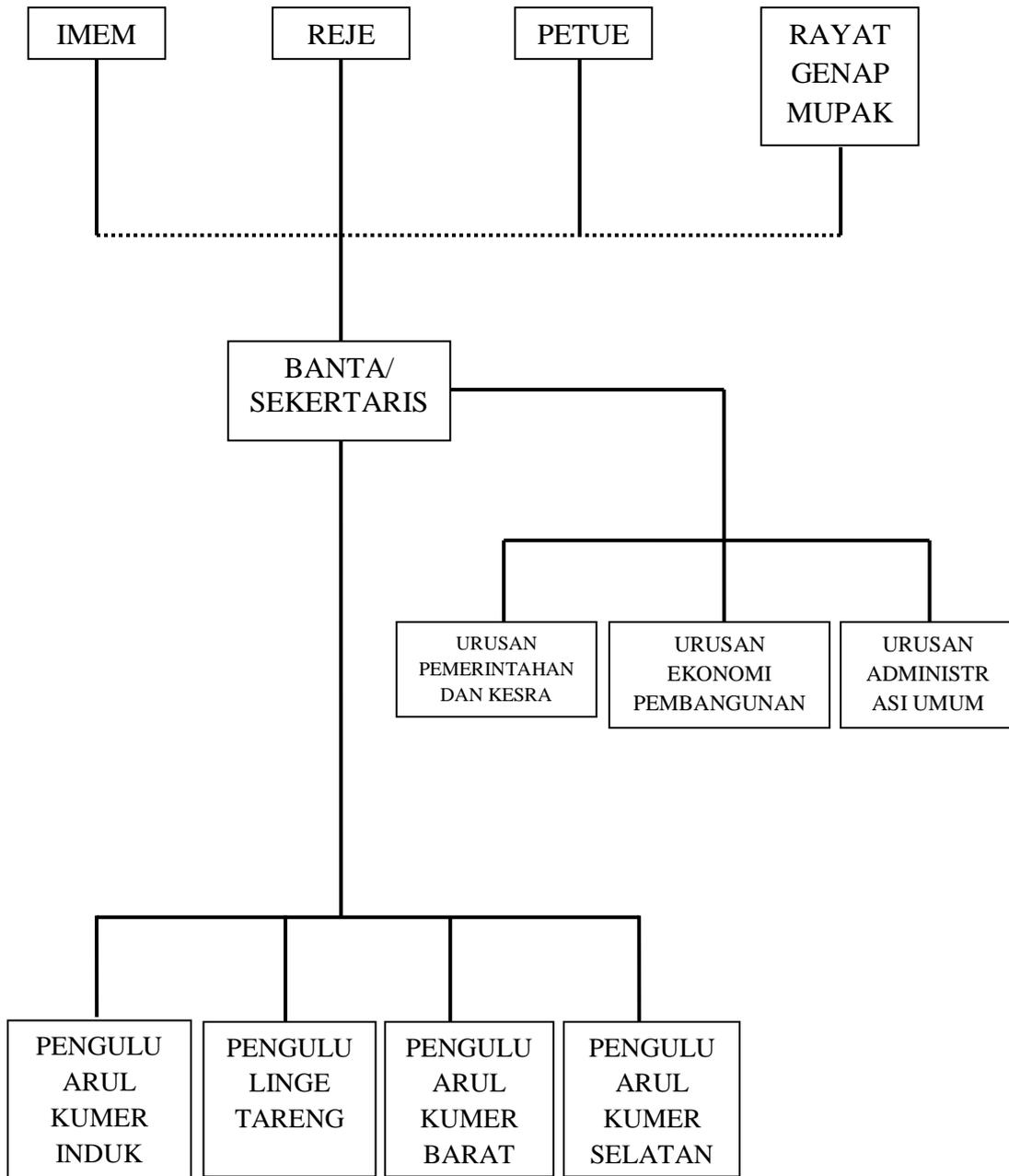
Untuk melaksanakan pasal 13 kampung mempunyai pungsi menyelenggarakan pemerintahan secara otonom berdasarkan asas otonomi yang besipat asal usul, desentralisasi maupun tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada dikampung.

### **F. Wewenang**

Kewenangan kampung mencakup 2 unsur yaitu:

- 1) Tugas pembantuan dari pemerintah yang diserahkan pengaturannya kepada kampung.
- 2) Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul kampung dan ketentuan adat dan istiadat.

### G. Struktur pemerintahan organisasi pemerintahan kampung



**Tabel 4.1 struktur pemerintahan kampung**

**Sumber : pemerintahan kampung kabupaten aceh tengah**

## **A. Uraian tentang tugas pokok dan fungsi aparat pemerintahan kampung.**

### **1) Kepala Kampung**

Adalah reje atau kepala kampung dan perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.

Pemerintahan kampung mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan kampung secara otonom, melaksanakan pembangunan, melestarikan adat dan istiadat, memanfaatkan sumber daya alam, membina kerukunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan syariat islam serta memelihara kehormatan wilayah dan warganya.

1. Adapun dari pengertian pemerintahan kampung, kepala kampung mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
  - a. Kepala kampung mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pembinaan adat kampung berdasarkan syariat islam.
  - b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 kepala mempunyai wewenang sebagai berikut:
  - c. Pemimpin menyelenggarakan pemerintahan kampung.
  - d. Mengajukan rancangan kampung.
  - e. Menetapkan Qanun kampung yang telah mendapat persetujuan bersama RGM.
  - f. Menyusun dan mengajukan rancangan qanun kampung tentang APB kampung untuk dibahas dan mendapat persetujuan bersama RGM.
  - g. Menyusun RPJM kampung dan RKP kampung melalui musyawarah perencanaan pembangunan kampung.

- h. Melaksanakan RPJ kampung dan RKP kampung.
- i. Membina perekonomian kampung dan mengkoordinasikan pembangunan kampung secara partisipatif.
- j. Memegang kekuasaan pengelolaan kekayaan dan keuangan kampung.
- k. Mewakilan kampungnya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan.
- l. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 2. Hak Dan Kewajiban Kepala Kampung

Dalam melaksanakan tugasnya kepala kampung mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat kampung lainnya kepada camat.
  - b. Mengajukan rancangan Qanun kampung.
  - c. Mengelola keuangan kampung dan kekayaan kampung sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
  - d. Menetapkan pejabat pengelola keuangan kampung.
  - e. Melipihkan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat kampung.
  - f. Menerima penghasilan tetap setiap bulan dan tujangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana di maksudkan dengan pasal 20 kepala kampung mempunyai kewajiban:

- a. Melaksanakan dan menegakan syariat islam, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan kampung yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan kampung.
- g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik.
- i. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan kampung.
- j. Melaksanakan yang menjadi kewenangan kampung.
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat dikampung.
- l. Mengembangkan ekonomi masyarakat dikampung.
- m. Membina, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat serta kearifan lokal.
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan dikampung.
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

- p. Membuat nota tugas kepada Sekertaris kampung apabila kepala kampung menjalankan tugas luar atau perjalanan dinas.
- q. Menyelenggarakan peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa adat, penyelenggaraan syariat dan tindakan pidana ringan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- r. Memelihara dan mendayagunakan aset/kekayaan kampung untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan kampung.

## **2). Sekretariat Kampung**

Sekretariat kampung adalah melaksanakan tugas untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas kepermerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif.

a) Adapun Pungsi Sekretariat Kampung Adalah:

1. Menyusun dan merumuskan kebijakan pemerintahan kampung.
2. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB kampung.
3. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolan barang milik kampung.
4. Menyusun rancangan keputusan kepala desa tentang pelaksanaan APB kampung.
5. Membantu kepala desa dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengulu, lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan.
6. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas perangkat kampung lainnya.
7. Melakukan pembinaan administrasi dan perangkat pemerintahan lainnya.

8. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Adapun Sekretariat Kampung Membawahi Tiga Urusan Yaitu:

1. Urusan pemerintahan ke karsa.
2. Urusan ekonomi dan pembangunan.
3. Urusan administrasi umum.

### **3). Imem Kampung (Tuan Kadi)**

Imem kampung atau tuan kadi Adalah unsur sarak opat yang mempunyai tugas memperlu sunet dan melaksanakan fungsi memimpin kegiatan keagamaan meningkatkan peribadatan peningkatan pendidikan agama dalam masyarakat. Imem kampung mempunyai kedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung dibidang keagamaan.

1. Adapun Fungsi Imem Kampung:

- a. Fungsi memperlu sunet sebagaimana di maksud pada pasal 70 huruf a dilaksanakan dalam bentuk penerapan syariat islam dan adat.
- b. Fungsi memelihara harkat, martabat dan adat istiadat masyarakat kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 huruf b dilaksanakan dalam bentuk memelihara dan melestarikan adat istiadat dan kearifan lokal yang diakui oleh masyarakat kampung.
- c. Fungsi membantu menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 huruf c dilaksanakan dalam rangka penyelesaian sengketa atau permasalahan yang timbul dimasyarakat bersama unsur Sarak Opat lainnya.

2. Imem Kampung Mempunyai Tugas Sebagai Berikut:
  - a. Menjalankan fungsi keagamaan, pengajian, dan pelaksanaan Syariat Islam.
  - b. Memimpin kegiatan peribadatan.
  - c. Menyelenggarakan seluruh kegiatan yang berkenan dengan pemeliharaan dan kemakmuran masjid/mersah dengan melaksanakan sholat fardhu serta perayaan hari-hari besar Islam.
  - d. Memberi nasehat dan pendapat berkenan dengan pelaksanaan Syariat Islam kepada kepala kampung baik diminta maupun tidak diminta.
  - e. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat yang berkenan dengan pelaksanaan syariat islam bersama unsur Sarak Opat lainnya.
  - f. Menjaga, memelihara dan melestarikan nilai-nilai adat yang tidak bertentangan dengan Syariat Islam.
  - g. Memimpin pengelolaan baitul mal kampung, harta Agama Islam dikampung dan pengembangan Tilawatil Qur'an.
  - h. Menjadi wali atas anak yatim/piatu yang tidak mempunyai wali dan melaksanakan sinte morep dan sinte mate.

## **2) Petue (Kepala Adat)**

Petue atau kepala adat adalah unsur sarak opat yang mempunyai fungsi musidik sasat dengan tugas melakukan penelitian dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Kedudukan petue sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung di bidang Yudikatif berdasarkan hukum adat

Adapun Fungsi, Tugas, Wewenang Sebagai Berikut:

- a. Petue Mempunyai Fungsi Yaitu:
  - a. Musidik sasat Sebagaimana dimaksud pada pada pasal 86 huruf a dilaksanakan dengan bentuk penyelidikan dan penelitian terhadap keadaan kampung dan masyarakat kampung untuk disampaikan kepada Kepala Desa sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
  - b. Memelihara, harkat dan martabat adat istiadat masyarakat kampung, sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 huruf b, dilaksanakan dalam bentuk memelihara dan melestarikan adat istiadat dan kearifan lokal yang diakui oleh masyarakat kampung.
  - c. Membantu menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud pada pasal 86 huruf c, dilaksanakan dalam rangka penyelesaian sengketa atau permasalahan yang timbul dimasyarakat bersama unsur Sarak Opat lainnya.
- b. Adapun Tugas Petue Adalah Sebagai Berikut:
  - a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa baik diminta ataupun tidak.
  - b. Memberikan alternatif pemecahan masalah terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat kepada Kepala Desa untuk diputuskan.
  - c. Melakukan penyelidikan dan penyidikan, penuntutan atas sengketa yang timbul dalam masyarakat yang berkenaan dengan pelanggaran Syariat Islam dan adat-istiadat untuk disampaikan kepada Kepala Desa sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
  - d. Menjaga, memelihara, dan melestarikan nilai-nilai adat-istiadat.

- e. Melaksanakan tugas lain yang diminta oleh Kepala Desa.
- c. Wewenang Petue Adalah Sebagai Berikut:
  - a. Mengajukan saran dan pendapat atau pertimbangan kepada Kepala Desa.
  - b. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama unsur Sarak Opat lainnya.
  - c. Memanggil, menggeledah, meminta dan menyita keterangan kepada warga kampung yang terkait dengan sengketa.
  - d. Mengatasi penyelesaian sengketa melalui musyawarah perdamaian sebelum dilanjutkan kemusyawarahkan Sarak Opat.
  - e. Menghentikan penyidikan jika tidak ditemukan bukti-bukti yang cukup kuat atau dapat menimbulkan kerugian yang berdampak luas.

**Adapun Hak Dan Kewajiban Petue Sebagai Berikut:**

- a. Petue Mempunyai Hak Dalam Menjalankan Tugasnya Yaitu:
  - a. Melakukan teguran baik lisan maupun tertulis terhadap warga kampung yang melakukan pelanggaran adat-istiadat.
  - b. Menunjuk dan menetapkan sekolat.
  - c. Menerima penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan kampung atau sumber lainnya yang sah.
- b. Petue Mempunyai Kewajiban Dalam Menjalankan Tugasnya Yaitu:
  - a. Melaksanakan dan melestarikan adat-istiadat kampung sesuai Syariat Islam memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- c. Menjalin hubungan kerja dengan unsur Sarak Opat dan mitra kerjanya.
- d. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Petue.
- f. Ikut mendamaikan perselisihan masyarakat dikampung bersama unsur Sarak Opat lainnya.
- g. Membina mengayomi dan melestariakan nilai-nilai Syariah dan adat istiadat
- h. Berperan aktif dalam peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa adat, perdata pelanggaran Syariat Islam dan tindak pidana ringan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

### **3) Rakyat Genap Mupakat/Rgm (BPD)**

Rakyat Genap Mupakat ( BPD desa) adalah unsur Sarak Opat atau (empat unsur) yang anggotanya dipilih secara musawarah oleh masyarakat kampung yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat, termasuk pemuda dan pemudi, pembuka adat, cendikiawan, yang ada dikampung berpungsi mengayomi adat dan istiadat berpartisipasi dalam penyusunan Qanun kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung.

Adapun pungsi tugas dan wewenag RGM sebagai berikut:

1. Fungsi RGM Meliputi:
  - a. Legilasi, sebagai mana dimaksud pada Ayat 1 huruf a, dilaksanakan dalam pembentukan dan perubahan Qanun kampung dengan persetujuan bersama Kepala Desa.

- b. Penganggaran, sebagai mana dimaksud Ayat 1 huruf b, dilaksanakan dalam bentuk pemberian persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas Qanun kampung tentang APBK kampung.
- c. Pengawasan, sebagai mana dimaksud Ayat 1 huruf c dilaksanakan melalui pelaksanaa Qanun kampung dan penyelenggaraan pemerintahan kampung.
- d. Pungsi penyelesaian sengketa sebagai mana dimaksud pada Ayat 1 huruf d dilaksanakan dalam rangka musyawarah penyelesaian sengketa atau permasalahan yang timbul dimasyarakat bersama unsur Sarak Opat lainnya.

## 2. Tugas RGM

Adapun tugas RGM adalah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan kampung Wewenang RGM meliputi:

- 1) Mengajukan dan mengubah Qanun Kampung bersama Kepala Desa.
- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APB kampung dan Qanun Kampung.
- 3) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- 4) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa kepada bupati melalui Camat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama unsur Sarak Opat lainnya.
- 6) Menyerap, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

3. Hak Dan Kewajiban RGM , Adapun Hak RGM Yaitu:
  - 1) Memilih dan dipilih.
  - 2) Mengajukan rancangan Qanun Kampung
  - 3) Mengajukan pertanyaan.
  - 4) Menyampaikan usul dan pendapat.
  - 5) Memperoleh tunjangan.
4. Adapun Kewajiban RGM Yaitu:
  - 1) Melestarikan, mengawasi, dan menegakkan nilai-nilai Syariat Islam.
  - 2) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945.
  - 3) Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Ripublik Indonesia serta menaati segala peraturan perundang-undangan.
  - 4) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan kampung.
  - 5) Memproses pemilihan Kepala Desa.
  - 6) Menyerap menampung menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat.
  - 7) Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
  - 8) Menghormati nilai-nilai sosial budaya adat-istiadat masyarakat setempat dan menjaga norma serta etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil wawancara langsung dilapangan kepada narasumber diperoleh dari kategorisasi implementasi kebijakan publik adalah sebagai berikut:

##### **1. Adanya Tujuan Yang Ingin Di Capai**

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti kepada bapak Kamaluddin selaku kepala desa Arul Putih pada tanggal 18 Maret 2017 hari Jum'at, dikantor desa Arul Putih. Menyatakan adanya tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, menyediakan sarana dan-prasarana. Guna untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat desa secara merata.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada bapak Jamaluddin selaku sekertaris kampung arul putih pada tanggal 20 Maret 2017 hari Senin dikantor kepala kampung Arul Putih, memberikan tanggapan yang sama dengan yang diucapkan oleh kepala desa diatas, dengan adanya tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, menyediakan sarana dan-prasarana, sudah hampir terlaksana namun tidak terlepas dari kendala yang ada untuk mencapai suatu tujuan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada bapak Usman Kari selaku kepala dusun kampung Arul Putih pada tanggal 21 Maret 2017 hari Selasa dikantor desa Arul Putih. Mengatakan bentuk tujuan yang ingin capai itu. Ada, dalam menjalankan suatu tujuan pemerintahan kampung yang secara

maksimal masih belum terwujud, karena masih kurangnya penyediaan sarana-prasana dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pemerintahan kampung.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada ibu Nurhayati selaku masyarakat desa Arul Putih pada tanggal 18 Maret 2017 hari Sabtu dikediamannya. Mengatakan bahwa tujuan dari implementasi Qanun tersebut belum tercapai secara maksimal karena kurangnya fasilitas yang ada di desa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada ibu Seri Murni selaku masyarakat desa Arul Putih pada tanggal 18 Maret 2017 hari Sabtu dikediamannya. Mengatakan perlunya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat karena sebagai aparat kampung merupakan sudah kewajiban dalam hal yang menyangkut tugas pokok dan fungsi sebagai pemerintahan kampung.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti yang diperoleh dari bapak Sabardi Mulya sebagai masyarakat kampung Arul Putih pada tanggal 19 Maret 2017 hari Minggu dikediamannya. Mengatakan perlunya penambahan sarana yang dilakukan pemerintahan kampung, maka harapan saya perlunya memperbanyak lagi sarana dan prasarana untuk menunjang pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa arul putih.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti yang diperoleh dari bapak Ali Mustapa sebagai masyarakat kampung Arul Putih pada tanggal 19 Maret 2017 hari Minggu dikediamannya. Mengatakan harapan saya, dengan adanya Qanun ini perlunya peningkatan pelayanan administrasi dan meningkatkan kualitas syariat islam yang diterapkan oleh pemerintahan kampung agar tujuan sesuai dengan syariat islam.

Berdasarkan data yang telah didapat penulis menyimpulkan bahwa tujuan yang ingin dicapai belum terlaksana secara maksimal dalam peningkatan kualitas pelayanan dan sarana-prasarana disetiap kepentingan yang ada di desa, dan hal tersebut harus lebih diupayakan lagi.

## **2. Adanya Mekanisme Perintah Dan Kontrol Dari Pimpinan Dalam Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Publik**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada bapak Kamaluddin selaku kepala desa Arul Putih pada tanggal 18 Maret 2017 hari Jum'at, dikantor desa Arul Putih. Mengatakan pemerintahan kampung akan berjalan jika menjalankan tugas yang diberi dari pimpinannya dilaksanakan, dan diawasi, seperti pembuatan surat penting yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan memberikan pengawasan kepada aparat desa dalam menjalalankan tugasnya sebagai pemerintahan kampung yang menyangkut hal-hal yang diperlukan oleh masyarakat. Dalam hal tersebut harus adanya komunikasi yang baik antara pemerintahan dan aparat desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada bapak Jamaluddin selaku sekertaris desa Arul Putih pada tanggal 20 Maret 2017 hari Senin dikantor desa. mengatakan dalam melakukan tugas dan fungsi perlu ada pengawasan dan perintah dikarenakan aparat-aparat desa sebagian tidak mengetahui hal apa saja yang perlu dilakukan dalam menjalankan perintah oleh kepala desa, dalam mencapai tujuan bersama yaitu memberikan pelayanan administrasi yang sesuai dengan kebijakan Qanun yang ada. Saran untuk meningkatkan kualitas pelayanan perlu adanya kerja sama antara pimpinan dan

aparatus desa untuk lebih meningkatkan pelayanan administrasi yang maksimal kepada masyarakat desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada bapak Usman Kari selaku kepala dusun kampung Arul Putih pada tanggal 21 Maret 2017 hari Selasa di kantor desa arul putih. Mengatakan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing hal tersebut tidak terlepas dari adanya perintah yang dibuat oleh pimpinan serta adanya pengawasan terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pimpinannya. Maka perlunya peningkatan hubungan yang baik antara atasan dan bawahan sehingga berjalanlah fungsi pemerintahan sebagaimana yang diinginkan masyarakat desa melalui ketransparanan pimpinan dengan aparat desa dalam segala hal yang menyangkut umum.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada ibu Nurhayati selaku masyarakat desa Arul Putih pada tanggal 18 Maret 2017 hari Sabtu di kediamannya. Mengatakan pemerintahan kampung agar lebih ditingkatkan lagi pengawasan kepada aparat desa dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat desa agar masyarakat lebih gampang dalam hal kepengurusan yang ada di desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada ibu Seri Murni selaku masyarakat desa Arul Putih pada tanggal 18 Maret 2017 hari Sabtu di kediamannya. Mengatakan didalam hal pengawasan kiranya perlu ditingkatkan lagi dalam mengawasi aparat desa, melalui perintah dari pimpinan terhadap kewajiban mereka sebagai aparat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti yang diperoleh dari bapak Sabardi Mulya sebagai masyarakat kampung Arul Putih pada tanggal 19 Maret 2017 hari Minggu dikediamannya. Mengatakan agar pemerintahan kampung lebih memperketat lagi pengawasan kinerja aparat-aparat desa dalam menjalankan tugas.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti yang diperoleh dari bapak Ali Mustapa sebagai masyarakat kampung Arul Putih pada tanggal 19 Maret 2017 hari Minggu dikediamannya. Mengatakan masih perlunya setiap pengawasan yang dibeikan pimpinan dilakukan agar mengalami peningkatan yang baik dalam bekerja, agar aparat-aparat desa tidak membeda-bedakan masyarakat dalam hal kepentingan umum yang ada didesa.

Bedasarkan data yang telah didapat penulis menyimpulkan bahwa perlunya pengawasan lebih baik lagi terhadap kinerja aparat desa dalam menjalankan tugas dan pungsinya terhadap masyarakat desa.

### **3. Adanya Prosedur-Prosedur Yang Dilakukan**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada bapak Kamaluddin selaku kepala desa Arul Putih pada tanggal 18 Maret 2017 hari Jum'at, dikantor desa arul putih. Mengatakan Dalam setiap proses yang diberikan pemerintahan kampung terhadap masyarakat desa Arul Putih, tidak akan berjalan dengan baik jika prosedur yang telah dibuat tidak dijalankan dalam hal memberi dan menerima pelayanan secara keseluruhan. Maka dengan adanya prosedur yang telah dibuat sekiranya dapat diterima oleh masyarakat yang ingin menerima pelayanan administrasi, seperti menyediakan berkas yang diperlukan masyarakat dalam pembuatan surat, dan memberikan sanksi bagi yang melanggar aturan yang

ada seperti berjudi, mabuk mabukan, dan yang bersifat merusak kampung, Serta yang melanggar syariat islam.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada bapak Jamaluddin selaku sekretaris kampung Arul Putih pada tanggal 20 Maret 2017 hari Senin dikantor kepala kampung Arul Putih, memberikan tanggapan yang sama dengan yang diucapkan oleh kepala desa diatas, Maka dengan adanya prosedur yang telah dibuat sekiranya dapat dilakukan oleh masyarakat yang ingin menerima pelayanan administrasi, seperti menyediakan berkas yang diperlukan masyarakat dalam pembuatan surat, dan memberikan sanksi bagi yang melanggar aturan yang ada seperti berjudi, mabuk-mabukan, dan yang bersifat merusak kampung, Serta yang melanggar Syariat Islam. Agar kiranya setiap masyarakat yang akan diberi pelayanan yang baik agar melengkapi segala persyaratan administrasi guna memperlancar pelayanan yang diberikan oleh pemerintahan kampung.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada bapak Usman Kari selaku kepala dusun kampung Arul Putih pada tanggal 21 Maret 2017 hari Selasa dikantor desa arul putih. Mengatakan didalam suatu pelayanan terdapat prosedur agar kiranya masyarakat yang menerima pelayanan memenuhi semua prosedur yang ada guna untuk memperlancar kepengurusan administrasi masyarakat seperti yang telah dibuat pemerintahan kampung.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada ibu Nurhayati selaku masyarakat desa Arul Putih pada tanggal 18 Maret 2017 hari Sabtu dikediamannya. Mengatakan terlihat dari prosedur-prosedur yang dibuat sudah

ada agar lebih diarahkan lagi masyarakat dalam setiap kepengurusan agar kami mengerti dengan apa yang dikatakan pemerintahan kampung.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada ibu Seri Murni selaku masyarakat desa Arul Putih pada tanggal 18 Maret 2017 hari Sabtu dikediamannya. Mengatakan masyarakat belum sepenuhnya mengerti dengan prosedur apa saja yang dibuat dan apakah prosedur tersebut ada, dan apa saja yang dikeluarkan pemerintahan kampung.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti yang diperoleh dari bapak Sabardi Mulya sebagai masyarakat kampung Arul Putih pada tanggal 19 Maret 2017 hari Minggu dikediamannya. Mengatakan Dengan diterpakan Qanun ini oleh pemerintahan kampung maka prosedur-prosedur yang dijalankan, agar lebih sesuai penerapannya seperti yang diinginkan oleh masyarakat desa, agar lebih gampang dalam menjalankan setiap prosedur yang dibuat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti yang diperoleh dari bapak Ali Mustapa sebagai masyarakat kampung Arul Putih pada tanggal 19 Maret 2017 hari Minggu dikediamannya. Mengatakan dalam beberapa prosedur perlu ditinjau kembali dalam proses penerapannya dan pelaksanaan dalam masyarakat dapat dilakukan oleh semua pihak yaitu pemerintahan kampung dan masyarakat desa.

Bedasarkan data yang telah didapat, penulis menyimpulkan bahwa perlu ditingkatkan lagi pelaksanaan dan menjalankan prosedur-prosedur yang terapkan oleh pimpinan terhadap aparat desa dan masyarakat guna agar tidak terjadi hal yang menyimpang dan merusak nama baik kampung dan tidak sesuai dengan syari'at islam.

#### **4. Adanya Intraksi Antara Pemerintah Dan Masyarakat**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada bapak Kamaluddin selaku kepala desa Arul Putih pada tanggal 18 Maret 2017 hari Jum'at, dikantor desa arul putih. Mengatakan mengenai adakah pemerintah desa berinteraksi dengan dengan masyarakat dalam terwujudnya kebijakan dan pelaksanaan yang diberikan yaitu beliau menjawab ada, terutama terkait dengan masyarakat kampung. Itu yang utama. Seperti melakukan intraksi sosial langsung dengan masyarakat dan menghadiri segala acara yang dibuat pemerintahan kampung maupun masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada bapak Jamaluddin selaku sekretaris kampung Arul Putih pada tanggal 20 Maret 2017 hari Senin dikantor kepala kampung arul putih. Mengatakan pemerintahan kampung harus berupaya meningkatkan lebih baik intraksi kepada masyarakat baik dalam memeberikan pelayanan adminstrasi masyarakat dan hal lain, seperti pemerintahan kampung dan masyarakat ikut serta dalam mengikuti kegiatan rapat dalam hal kepentingan umum.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada bapak Usman Kari selaku kepala dusun kampung Arul Putih pada tanggal 21 maret 2017 hari Selasa dikantor desa arul putih. Mengatakan hal tersebut dapat dilihat dari gotong royong yang diadakan setiap bulan dua kali dalam sebulan berjalan lancar walaupun ada sebagian masyarakat tidak mengikuti hal tersebut. Agar masyarakat yang jarang mengikuti kegitan bersama dikampung seperti gotong royong dan rapat kepentingan kampung agar lebih ditingkatkan lagi kerja sama dalam melakukan intraksi di kampung Arul Putih.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada ibu Nurhayati selaku masyarakat desa Arul Putih pada tanggal 18 Maret 2017 hari Sabtu dikediamannya. Mengatakan masih perlu ditingkatkan lagi intraksi antara masyarakat dengan pemerintah agar proses penerimaan dan pemberian pelayanan tidak akan terbengkalai lagi dan masyarakat tidak akan segan dalam berintraksi langsung dengan aparat-aparat desa dalam hal kepengurusan administrasi dan lain-lain.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada ibu Seri Murni selaku masyarakat desa Arul Putih pada tanggal 18 Maret 2017 hari Sabtu dikediamannya. Mengatakan intraksinya pemerintahan kampung dengan masyarakat desa sudah mulai terlihat peningkatan dan perlu lebih ditingkatkan lagi hal tersebut demi kelancaran dalam mengurus kepentingan masyarakat dan kenyamanan pelayanan yang diperoleh dari pemerintahan kampung.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti yang diperoleh dari bapak Sabardi Mulya sebagai masyarakat kampung Arul Putih pada tanggal 19 Maret 2017 hari Minggu dikediamannya. Mengatakan dalam melaporkan aspirasi mereka dalam setiap kepengurusan termasuk administrasi masyarakat masih sulit di karenakan jaranginya intraksi yang dilakukan dengan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti yang diperoleh dari bapak Ali Mustapa sebagai masyarakat kampung Arul Putih pada tanggal 19 Maret 2017 hari Minggu dikediamannya. Mengatakan pemerintahan kampung harus sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat melalui intraksi yang baik antara pemerintahan kampung dan masyarakat demi terselenggaranya pemerintahan kampung.

Bedasarkan data yang telah didapat, penulis menyimpulkan bahwa intraksi yang dilakukan pemerintahan kampung dengan masyarakat, masih kurang dan perlu ditingkatkan lagi, agar masyarakat bisa langsung menyampaikan aspirasinya dan tidak harus datang langsung ke kantor desa.

## **B. Pembahasan**

### **1. Adanya Tujuan yang di capai**

Pembahasan penelitian ini mengenai Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 4 Tahun 2011 tentang pemerintahan kampung dalam rangka Meningkatkan pelayanan administrasi masyarakat.

Dalam hal pencapaian tujuan menurut Agustino (2006:139) mengatakan implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan kebijaksanaan dasar. Biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mendefenisikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan dan mengatur proses implementasi.

Pada hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Kamaluddin dalam wawancara pada tanggal 17 Maret 2017 hari Jum'at, selaku kepala desa Arul Putih Kabupaten Aceh Tengah, beliau memberikan jawaban bahwa adanya tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, menyediakan sarana-prasarana. Guna untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat desa secara merata.

Sebagaimana dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal, 20 Maret 2017 hari Senin dengan Bapak Jamaluddin selaku sekretaris kampung Arul Putih.

Memberikan tanggapan yang sama dengan yang diucapkan oleh kepala desa diatas, dengan adanya tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, menyediakan sarana-prasarana, sudah hampir terlaksana namun tidak terlepas dari kendala yang ada untuk mencapai suatu tujuan.

Hal ini ditujukan untuk lebih meningkatkan kualitas pelaksanaan dalam memberi pelayanan dan memfasilitasi keperluan seperti perlunya penambahan sarana-prasarana, perlunya pembangunan untuk menunjang pemerintahan yang ada di masyarakat itu sendiri. Pembuatan Qanun Nomor 4 Tahun 2011 tentang pemerintahan kampung dengan adanya Tujuan yang dicapai agar kiranya dilaksanakan oleh pemerintahan kampung. Karena itu pemerintahan kampung harus lebih memperhatikan dan melakukan tujuan yang ingin dicapai dengan menambah keperluan di desa tersebut seperti, sarana-prasarana, guna untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi masyarakat dan dalam mewujudkan visi pemerintahan kampung yaitu meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

## **2. Adanya Mekanisme Perintah Dan Kontrol Dari Pimpinan Dalam Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Publik**

Pemerintahan kampung di desa Arul Putih Kabupaten Aceh Tengah memberikan pengawasan dalam pelaksanaan tugas pemerintahannya dengan dengan aparat-aparat desa hal ini yang di samapaikan oleh sebagai berikut:

Menurut Presman dan Wildavski (1979:5) Implementasi kebijakan publik adalah menjadikan orang melakukan apa-apa yang diperintahkan dan mengontrol

urutan tahapan dalam sebuah sistem dan pengembangan sebuah program kontrol yang meminimalkan konflik dan deviasi dari tujuan yang telah ditetapkan. Konsep kebijakan ini menitik beratkan dengan apa yang sesungguhnya yang dikerjakan dari pada apa yang perintah dalam pengawasan.

Pada hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Kamaluddin dalam wawancara pada tanggal 17 Maret 2017 hari Jum'at, selaku kepala desa Arul Putih Kabupaten Aceh Tengah, Mengatakan pemerintahan kampung akan berjalan jika menjalankan tugas yang diberi dari pimpinannya dilaksanakan, dan diawasi, seperti pembuatan surat penting yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan memberikan pengawasan kepada aparat desa dalam menjalankan tugasnya sebagai pemerintahan kampung yang menyangkut hal-hal yang diperlukan oleh masyarakat. Dalam hal tersebut harus adanya komunikasi yang baik antara pemerintahan dan aparat desa.

Pengawasan dan perintah inilah yang membedakan kebijakan dari suatu perintah dan pengawasan yang merupakan pilihan dari beberapa alternatif yang ada. Dari penjelasan diatas, disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu hal-hal yang diputuskan oleh pemerintah dan hal-hal yang tidak diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan. Dan dalam hal tersebut pemerintah harus lebih aktif lagi dalam setiap pengawasan terhadap kinerja aparat-aparat desa terhadap apa saja yang wajib dikerjakan dan tidak dikerjakan yang sesuai dengan tugas fungsinya masing masing dalam memberikan pelayanan administrasi masyarakat yang maksimal.

### **3. Adanya Prosedur-Prosedur Yang Dilakukan**

Adapun dengan adanya prosedur yang dilakukan dari kebijakan Qanun Nomor 4 Tahun 2011 tentang pemerintahan kampung dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi masyarakat.

Seperti yang dikatakan Solichin (1991:45) mengatakan implemetasi kebijakan adalah aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan implementasi tidak hanya sekedar bersangkutan paut dengan mekaisme penjabaran-penjabaran keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu, ini menyangkut masalah koflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu dari suatu kebijakan. Implementasi kebijakan bukan hanya sekedar bersangkutan paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur lewat saluran-saluran birokrasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada bapak Kamaluddin selaku kepala desa Arul Putih pada tanggal 17 Maret 2017 hari jum'at, dikantor desa arul putih. Mengatakan pemerintahan kampung akan berjalan jika menjalankan tugas yang diberi dari pimpinan nya dilaksanakan, dan diawasi, seperti pembuatan surat penting yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan memberikan pengawasan kepada aparat desa dalam dalam menjalankan tugasnya sebagai pemerintahan kampung yang menyangkut hal-hal yang diperlukan oleh masyarakat. Dalam hal ini harus adanya komunikasi yang baik antara pemerintahan dan aparat desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada bapak Jamaluddin selaku sekertaris kampung Arul Putih pada tanggal 20 Maret 2017 hari Senin dikantor kepala kampung arul putih, memberikan tanggapan yang sama

dengan yang diucapkan oleh kepala desa diatas, Maka dengan adanya prosedur yang telah dibuat sekiranya dapat lakukan oleh masyarakat yang ingin menerima pelayanan administrasi, seperti menyediakan berkas yang diperlukan masyarakat dalam pembuatan surat, dan memberikan sanksi bagi yang melanggar aturan yang ada seperti berjudi, mabuk mabukan, dan yang bersipat merusak kampung, Serta melanggar syariat islam. Agar kiranya setiap masyarakat yang akan diberi pelayanan yang baik agar melengkapi segala persyaratan administrasi guna memperlancar pelayanan yang diberikan oleh pemerintahan kampung.

kesadaran aparat-aparat desa yang menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diterapkan Qanun yang ada dalam proses menjalankan pemerintahannya dan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Disini tampak bahwa adanya prosedur yang sudah terbentuk dari Qanun tentang Pemerintahan kampung dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi masyarakat desa arul putih Kabupaten Aceh Tengah. Dengan adanya prosedur yang telah dibuat kiranya dalam setiap proses pelaksanaannya perlu adanya tindakan yang harus dilakukan, dengan cara memberi arahan kepada aparat-aparat desa agar mereka lebih paham atau mengerti dalam menjalankan prosedur yang ada dan memberikan sanksi bagi yang melanggar prosedur tersebut dalam setiap menjalankan tugasnya. Hal tersebut berguna demi terlaksananya pemerintahan kampung yang sesuai dengan Qanun yang ditetapkan pemerintah dan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat desa.

#### **4. Adanya Intaksi Antara Pemerintah Dan Masyarakat.**

Ada suatu tidaknya suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat-aparat desa atau pemerintahan kampung dalam menentukan suatu hal baik suatu maupun tidak

Menurut Majone (1978:8) mengatakan implemementasi kebijakan publik adalah cara pada individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi berintraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya. Tindakan-tindakan tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengubah intraksi yang tidak baik menjadi intraksi yang baik dan yang di harapkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada bapak Kamaluddin selaku kepala desa Arul Putih pada tanggal 17 Maret 2017 hari Jum'at, dikantor desa arul putih. Mengatakan mengenai adakah pemerintah desa berinteraksi dengan masyarakat dalam terwujudnya kebijakan dan pelaksanaan yang diberikan yaitu beliau menjawab ada, terutama terkait dengan masyarakat kampung. Itu yang utama. Seperti melakukan intraksi sosial langsung dengan masyarakat dan menghadiri segala acara yang dibuat pemerintahan kampung maupun masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada bapak Jamaluddin selaku sekretaris kampung arul putih pada tanggal 20 maret 2017 hari Senin dikantor kepala kampung Arul Putih. Mengatakan pemerintahan kampung harus berupaya meningkatkan lebih baik intraksi kepada masyarakat baik dalam memeberikan pelayanan adminstrasi masyarakat dan hal yang lain, seperti pemerintahan kampung dan masyarakat ikut serta dalam mengikuti kegiatan rapat dalam hal kepentingan umum.

dalam rangka melanjutkan usaha-usaha pemerintahan kampung dalam berintraksi dengan baik untuk mencapai perubahan-perubahan yang besar dan baik di pemerintahan maupun di masyarakat, bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan mulai sebelum adanya hubungan yang baik, dengan tujuan untuk mempererat hubungan pemerintahan dan masyarakat, agar kedepannya lebih baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh semua pihak. Dengan demikian, tampak bahwa adanya suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan kampung dalam menanamkan nilai-nilai terhadap masyarakat untuk berintraksi, guna mencapai pelaksanaan Qanun pemerintah dan bisa berjalan dengan yang diharapkan. Dalam setiap intraksi yang dilakukan pemerintahan kampung dengan masyarakat perlu ditingkatkan kerja sama antar pimpinan dengan aparat desanya dalam menjalin hubungan yang baik antar pemerintahan kampung dengan masyarakat baik hubungan kerja maupun hubungan kekeluargaan hal tersebut harus dapat dibedakan oleh aparat-aparat desa, guna untuk tidak terjadinya perbedaan dalam pemeberian pelayanan atau nepotisme.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis untuk melengkapinya dalam penyajian data dan pembahasan, maka penulis akan menyimpulkan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan akan memberikan saran yang mungkin berguna bagi kita semua. Setelah melakukan pembahasan maka beberapa kesimpulan dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 4 Tahun 2011 di Kabupaten Aceh Tengah tentang pemerintahan kampung sudah cukup baik dalam membantu melakukan peningkatan kualitas pelayanan administrasi di desa arul putih. Adapun kategorisasi yang menjadi tolak ukur dari beberapa pertanyaan yaitu yang pertama, adanya tujuan yang di capai dan dilaksanakan oleh pemerintahan kampung dalam melaksanakan Tujuan Qanun No 4 tahun 2011. Kedua, Adanya Mekanisme Perintah Dan Kontrol Dari Pimpinan Dalam Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Publik adalah sudah terlaksana dalam setiap proses pengawasan dan berkewajiban menjalankan Tujuan Qanun Nomor 4 Tahun 2011. Ketiga, adanya prosedur-prosedur yang dilakukan dimana terdapat suatu proses dalam mencapai suatu prosedur yang baik dan sesuai dengan ketentuan Qanun Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan kampung di Kabupaten Aceh Tengah. Ke empat, adanya interaksi antara pemerintah dan masyarakat, adapun interaksi yang dilakukan pemerintahan kampung adalah melaksanakan tugas dan kewajibannya seperti tujuannya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dimana hal tersebut sesuai dengan Qanun Nomor 4 Tahun 2011.

Dapat disimpulkan bahwa dari keempat kategorisasi tersebut maka implementasi Qanun Nomor 4 Tahun 2011 telah ada dilaksanakan dan sudah berjalan cukup baik diwilayah kampung arul putih Kabupaten Aceh Tengah. Upaya yang dilakukan untuk memahami kebijakan Qanun ini adalah bagaimana pemerintahan kampung mengevaluasi pelaksanaannya dan sosialisasi terlebih dahulu terhadap kebijakan peraturan tersebut dan pemberitahuan informasi kepada masyarakat serta melakukan penjajakan pelaksanaan kelapangan yaitu kemasyarakat yang akan menjadi tempat memberikan pelayanan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas maka penulis memberikan saran-saran dalam Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 4 Tahun 2011 tentang pemerintahan kampung dalam rangka Meningkatkan pelayanan administrasi masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah kampung diharapkan agar lebih aktif sebagai pihak yang melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2011 tentang pemerintahan kampung.
- b. Menyesuaikan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang pemerintahan kampung dengan situasi dan kondisi perkembangan masyarakat di desa arul putih Kabupaten Aceh Tengah sehingga diharapkan Qanun tersebut lebih berperan lagi dalam meningkatkan Kualitas pelaksanaan pelayanan.
- c. Menerapkan sanksi yang lebih tegas terhadap pihak yang melanggar ketentuan Qanun Nomor 4 Tahun 2011 tentang pemerintahan kampung dalam hal memberi pelayanan masyarakat.

- d. Meningkatkan sumber daya manusia dan mentalitas dari setiap anggota dari kepala pemerintahan kampung, memiliki tanggung jawab besar terhadap pekerjaannya, bersikap abdi masyarakat, memiliki kecakapan dan kemampuan yang tinggi untuk melakukan tugasnya dan kompeten.

## DAFTAR FUSTAKA

- Agusteno, leo. 2006. **Dasar-dasar kebijakan publik**. Penerbit alfabeta, Bandung.
- Anderson, James,1992. **Analisis Kebijakan Publik**. Caps Yokyakarta.
- Budiardjo, Miriam, 2000: **Dasar-Dasar Ilmu Politik**. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Dye, Thomas. R , 1976. **Understanding Public Policy**. Rosdakarya. bandung.
- Dunn, William. 2003. **Pengantar Analisis Kebijakan Publik**. Penerbit Gajah Mada Unyversity Press, Yogyakarta.
- Edward, 1980 : **Teori, Proses, dan Studi Kasus Kebijakan publik**.caps. Jakarta.
- Friedrich, Carl 2007. **Kebijakan Publik**. Mandar Maju.Bandung.
- Furchan, Arief. 1992. **Pengantar Metodeologi Penelitian Kualitatif**. Surabaya: Usaha Nasional.
- Guntur, setiawan. 2004. **Impelementasi dalam birokrasi pembangunan**. Penerbit remaja rosdakarya Offset, Bandung.
- Hanifah, 2002 **Implementasi Kebijakan Dan Politik**. PT Mutiara Widya Bandung.
- Inu kencana syafiie. Dkk, 1999. **Ilmu administrasi publik**. Pt Rineka Cipta, jakarta.
- Jenkins, W.I.1978: **Policy Analysis**.Oxford. Jakarta.
- Keban Y. 2008 : **enam dimensi administrasi publik konsep teori dan isu cetakan ke dua**. gava medya : yogyakarta.

- Knoepfel, Peter, Corrinne Larrue, Frederic Varone, Michael Hill, 2007 :  
***Public Policy Analysis***. The Policy Press. Bristol.
- Lewis, carol w, 2005. **stuart C the ethies challenge in public service: A problem-solving guide**. Market street, san fransisco: jossey-bass.
- Mazmanian, Daniel, dan Paul A Sabtier,(eds), 1981: **Effective Policy Implementation**. Lexington, Mass. D.C.Health.
- Moleong, lexy j, 2006. **Metode penelitian kualitatif edisi revisi**. Bandung : PT remaja Rosdakarya Offset.
- Meter Van,1978 : **Teori, Proses, Dan Studi Kasus Kebijakan Publik**.Caps. Jakarta.
- Nawawi, Hadari. 2003. **Administrasi Pendidikan**. Jakarta Gunung Agung.
- Nurdin,Usman 2002. **Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum**. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada , Jakarta.
- Richard rose, ET, 1969:***Policy Making in Great Britai***. Macmillan. London.
- Ridwan, Juniarso Dan Sodik Sudrajat, Achmad. 2009. **Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik**. Bandung: Nuansa.
- Syafri, Wirman, 2012. **Studi Tentang Administrasi Publik**. Erlangga Jakarta.
- Sondang P. Siagian, P, Mpa, Dr, Prof. **krangka dasar ilmu administrasi** /,cetakan 2, Rineka Cipta. jakata
- Solichin, Abdul Wahab, 1991: **Pengantar Analisis Kebijakan Negara**. Bumi Rieneka Cipta. Jakarta.
- Tangkilisan. 2003. **kebijakan publik yang membumi**. Yogyakarta YPAPI.

Udoji, chief J.O 2006 :**the african publikservant as apublic polici maker, african assiciation for publik administrasion and manajemen.** addis addeba.

Waldo, Dwight. 2003. **Pengantar Studi Public Administrastion.** Jakarta, Terj. Slamet W. Admosoedarmo. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi, 2002: **Teori Dan Proses Kebijakan Publik.** Media Presindo. Yogyakarta.

Wilson, W, 2012. **“The Study Of Administrasion”**.Political Quarterly,2.

Wildavsky, 1978: **Implementation As Evaluation, Dalam Policy Studies Review Annual .** Freeman ( Ed).Beverly. Sage.

Wahab, Solihin, Abdul, 1991. **Pengantar Kebijakan Negara.** Jakarta: Rieneka Cipta.

Peraturan Daerah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh.

Undang-undang no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Qanun Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung.

#### *Internet*

<https://id.wikipedia.org/wiki/Qanun>

[https://id.wikipedia.org/wiki/kabupaten Aceh Tengah](https://id.wikipedia.org/wiki/kabupaten_Aceh_Tengah)

[http://pelayanan prima neni.blogspot.com](http://pelayanan_prima_neni.blogspot.com)

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : MUSARADDIN

Tempat/Tgl.lahir : Takengon 26 Desember 1993, Aceh Tengah

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama/Bangsa : Islam/Indonesia

Alamat :Desa Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah

Anak ke : 1 (satu) dari 4 (empat) Bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah : Zulkifli

Ibu : Juniar

Alamat : Desa Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah

**Riwayat Pendidikan**

1. Tamat SD Negeri Arul Putih, Berijazah
2. Tamat SMP, Negeri 3 Takengon Berijazah
3. Tamat SMA Negeri 2 Takengon, Berijazah
4. Kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara sampai sekarang

Demikianlah daftar riwayat ini diperbuat dengan sebenarnya.

Penulis

MUSARADDIN

## DAFTAR WAWANCARA

**Judul Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 4 Tahun 2011  
Tentang Pemerintahan Kampung Dalam Rangka  
Meningkatkan Pelayanan Administrasi Masyarakat Di  
Desa Arul Putih Kabupaten Aceh Tengah**

**Nama :**

**Usia :**

**Jabatan :**

**Alamat :**

**Agama :**

**1. Adanya Tujuan yang ingin di capai**

- a. menurut bapak/ibu hal apa saja yang yang dilakukan dalam meningkatkan pelayanan administrasi masyarakat?
- b. menurut bapak/ibu faktor-faktor apa saja yang memepengaruhi tercapainya tujuan?
- c. menurut bapak/ibu kenadala apa saja yang dihadapi untuk meningkatkan pelayanan administrasi?

**2. Adanya mekanisme perintah dan kontrol dalam implementasi kebijakan publik**

- a. menurut bapak/ibu printahapa yang dijalankan oleh unsure pelaksana untuk mengimplementasikan QanunNomor 4tahun 2011?

- b. menurut bapak/ibu apakah perintah tersebut dapat dijalankan oleh unsure pelaksana?
- c. menurut bapak/ibu bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap perintah yang dijalankan ?

**3. Adanya prosedur-prosedur yang di lakukan**

- a. menurut bapak/ibu apakah ada prosedur yang dilakukan dalam kebijakan?
- b. menurut bapak/ibu apakah semua prosedur sudah terlaksana?
- c. menurut bapak/ibu apakah prosedur tersebut dapat dijalankan oleh pemerintahan kampung?

**4. Adanya intraksi pemeritah dan masyarakat**

- a. menurut bapak/ibu apakah ada intraksi yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan admiunistrasi?
- b. menurut bapak/ibu adakah kendala dalam berintraksi antara pemerintahan kampong dengan masyarakat?
- c. menurut bapak/ibu apakah hubungan intraksi tersebut dapat dijadikan sarana untuk mengimplementasikan Qanun Nomor 4 Tahun 2011.

## DAFTAR WAWANCARA

**Judul Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 4 Tahun 2011  
Tentang Pemerintahan Kampung Dalam Rangka  
Meningkatkan Pelayanan Administrasi Masyarakat Di  
Desa Arul Putih Kabupaten Aceh Tengah**

**Nama : KAMALUDDIN**

**Usia : 51 Tahun**

**Jabatan : Kepala Desa**

**Alamat : Arul Putih**

**Agama : Islam**

### **1. Adanya Tujuan Yang Ingin di capai**

- a. menurut bapak/ibu hal apa saja yang yang dilakukan dalam meningkatkan pelayanan administrasi masyarakat?

Jawab : meningkatkan sumber daya manusia dan menyediakan sarana-prasarana dalam proses memberikan pelayanan.

- b. menurut bapak/ibu faktor-faktor apa saja yang memepengaruhi tercapainya tujuan?

Jawab : adanya kerja sama dalam proses memberikan pelayanan antar aparat-aparat desa dengan masyarakat.

- c. menurut bapak/ibu kenadala apa saja yang dihadapi untuk meningkatkan pelayanan administrasi?

Jawab : sedikit banyaknya pasti ada kendala yaitu kurangnya sarana-prasarana dalam proses pelayanan.

**2 Adanya mekanisme perintah dan kontrol dalam implementasi kebijakan publik**

- a. menurut bapak/ibu perintah apa yang dijalankan oleh unsur pelaksana untuk mengimplementasikan Qanun Nomor 4 tahun 2011?

Jawab : adanya kerja sama pemerintahan kampung dengan masyarakat desa dalam menjalankan Qanun tersebut.

- b. menurut bapak/ibu apakah perintah tersebut dapat dijalankan oleh unsur pelaksana?

Jawab : ya, dijalankan karena hal tersebut merupakan kewajiban sebagai pelaksana

- c. menurut bapak/ibu bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap perintah yang dijalankan ?

jawab : pengawasan yang di jalani berjalan baik, seperti pengawasan kinerja aparat-aparat-aparat desa dalam tugas dan fungsi mereka masing.

**3 Adanya prosedur-prosedur yang di lakukan**

- a. menurut bapak/ibu apakah ada prosedur yang dilakukan dalam kebijakan?

Jawab : ada, karena di setiap pemerintahan kampung harus memiliki prosedur dalam menjalankan kebijakan yang ada.

- b. menurut bapak/ibu apakah semua prosedur sudah terlaksana?

Jawab : sudah, yaitu dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat desa.

- c. menurut bapak/ibu apakah prosedur tersebut dapat dijalankan oleh pemerintahan kampung?

Jawab : sudah, dikarenakan setiap aparat desa memiliki fungsi masing-masing dalam menjalankan pemerintahan kampung termasuk dalam menjalankan prosedur yang ada.

**d. Adanya intraksi pemeritah dan masyarakat**

- a. menurut bapak/ibu apakah ada intraksi yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan administrasi?

Jawab : ada, karena demi berjalannya pemerintahan kampung yang baik, harus ada kerja sama antar pemerintahan kampung dan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan.

- b. menurut bapak/ibu adakah kendala dalam berintraksi antara pemerintahan kampung dengan masyarakat?

Jawab : ada, tapi hal tersebut masih sedikit, kadang tidak semua aparat melakukan intraksi langsung dengan masyarakat.

- c. menurut bapak/ibu apakah hubungan intraksi tersebut dapat dijadikan sarana untuk mengimplementasikan Qanun Nomor 4 Tahun 2011?

Jawab : bisa, karena dengan adanya hubungan baik dengan masyarakat dapat dapt di jadikan sebagai menjalankan Qanun pemerintahan kampung.

## DAFTAR WAWANCARA

**Judul Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 4 Tahun 2011  
Tentang Pemerintahan Kampung Dalam Rangka  
Meningkatkan Pelayanan Administrasi Masyarakat Di  
Desa Arul Putih Kabupaten Aceh Tengah**

**Nama : JAMALUDDIN**

**Usia : 49 Tahun**

**Jabatan : Sekeraris Desa**

**Alamat : Arul Putih**

**Agama : Islam**

### **1. Adanya Tujuan Yang Ingin di capai**

- a. menurut bapak/ibu hal apa saja yang yang dilakukan dalam meningkatkan pelayanan administrasi masyarakat?

Jawab : meningkatkan sumber daya manusia dan menyediakan sarana-prasarana untuk memperoleh pemerintahan yang baik.

- b. menurut bapak/ibu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tercapainya tujuan?

Jawab : adanya keterlibatan pemerintahan kampung dalam proses memberikan pelayanan masyarakat.

- c. menurut bapak/ibu kenadala apa saja yang dihadapi untuk meningkatkan pelayanan administrasi?

Jawab : ada, kurang nya suber daya manusia, tapi hal tersebut tidak menurunkan semangat pemerintahan kampung dalam proses pemeberian pelayanan kepada masyarakat.

## **2 Adanya mekanisme perintah dan kontrol dalam implementasi kebijakan publik**

- a. menurut bapak/ibu printah apa yang dijalankan oleh unsur pelaksana untuk mengimplementasikan QanunNomor 4 tahun 2011?

Jawab : setiap perintah yang jalankan sudah sesuia, yaitu dalam memberikan pelayanan dan kerja sama yang baik demi mempermudah masyarakat.

- b. menurut bapak/ibu apakah perintah tersebut dapat dijalankan oleh unsur pelaksana?

Jawab : sudah sesuai, karena hal tersebut merupakan kewajiban sebagai pemerintahan kampung.

- c. menurut bapak/ibu bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap perintah yang dijalankan ?

Jawab : diniai sudah sesuia, seperti hampir setiap pekerjaan yang menyakut kepentingan umum terkadang tidak perlu pengawasan karena perintah tersebut adalah kewajiban.

## **3 Adanya prosedur-prosedur yang di lakukan**

- a. menurut bapak/ibu apakah ada prosedur yang dilakukan dalam kebijakan?

Jawab : ada, karena berjalannya setiap kebijakan sudah ada prosedur yang diikuti.

- b. menurut bapak/ibu apakah semua prosedur sudah terlaksana?

Jawab : sudah, yaitu setiap prosedur yang ada terlaksana dengan adanya kerja sama yang baik.

- c. menurut bapak/ibu apakah prosedur tersebut dapat dijalankan oleh pemerintahan kampung?

Jawab : sudah, yaitu dapat di lihat dari proses pemberian pelayanan kepada masyarakat dan itu harus ada prosedur yang diikuti.

#### **4 Adanya intraksi pemeritah dan masyarakat**

- a. menurut bapak/ibu apakah ada intraksi yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan administrasi?

Jawab : ada, yaitu kerja sama dalam setiap kegiatan yang menyangkut kepentingan umum.

- b. menurut bapak/ibu adakah kendala dalam berintraksi antara pemerintahan kampung dengan masyarakat?

Jawab : ada, seperti sebagian masyarakat terkadang kurang dalam mendengarkan informasi.

- c. menurut bapak/ibu apakah hubungan intraksi tersebut dapat dijadikan sarana untuk mengimplementasikan Qanun Nomor 4 Tahun 2011?

Jawab : bisa, karena dengan adanya intraksi yang baik, maka dapat di jalankan Qanun tersebut dengan sesuai dengan ketentuan yang ada.

## DAFTAR WAWANCARA

**Judul Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 4 Tahun 2011  
Tentang Pemerintahan Kampung Dalam Rangka  
Meningkatkan Pelayanan Administrasi Masyarakat Di  
Desa Arul Putih Kabupaten Aceh Tengah**

**Nama : USMAN KARI**

**Usia : 47 Tahun**

**Jabatan : Kepala Dusun**

**Alamat : Arul Putih**

**Agama : Islam**

### **1. Adanya Tujuan Yang Ingin di capai**

- a. menurut bapak/ibu hal apa saja yang yang dilakukan dalam meningkatkan pelayanan administrasi masyarakat?

Jawab : dalam menyediakan tempat untuk meningkatkan pelayan kepada masyarakat.

- b. menurut bapak/ibu faktor-faktor apa saja yang memepengaruhi tercapainya tujuan?

Jawab : adanya kekompakan aparat desa dalam memebrikan pelayanan.

- c. menurut bapak/ibu kendala apa saja yang dihadapi untuk meningkatkan pelayanan administrasi?

Jawab : ada, sebagian masyarakat tidak tau tujuan pemerintahan kampung dalam hal tersebut.

## **2 Adanya mekanisme perintah dan kontrol dalam implementasi kebijakan publik**

- a. menurut bapak/ibu perintah apa yang dijalankan oleh unsur pelaksana untuk mengimplementasikan Qanun Nomor 4 tahun 2011?

Jawab : sudah berjalan, dengan adanya kerja sama dalam mempermudah kepengurusan masyarakat desa.

- b. menurut bapak/ibu apakah perintah tersebut dapat dijalankan oleh unsur pelaksana?

Jawab : sudah, karena itu merupakan sesuatu yang harus di laksanakan dalam menjalankan tugas.

- c. menurut bapak/ibu bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap perintah yang dijalankan ?

Jawab : sudah bisa, karena hal tersebut menjadi tugas yang harus dijalanka.

## **3 Adanya prosedur-prosedur yang dilakukan**

- a. menurut bapak/ibu apakah ada prosedur yang dilakukan dalam kebijakan?

Jawab : ada, karena prosedur merupakan program pemerintahan yang harus diikuti.

- b. menurut bapak/ibu apakah semua prosedur sudah terlaksana?

Jawab : sudah, yaitu dalam proses memberikan apa yang di inginkan masyarakat.

- c. menurut bapak/ibu apakah prosedur tersebut dapat dijalankan oleh pemerintahan kampung?

Jawab : berjalan, karena pemerintahan mengikuti semua prosedur yang ada dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa.

#### **4 Adanya intraksi pemerintah dan masyarakat**

- a. menurut bapak/ibu apakah ada intraksi yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan administrasi?

Jawab : ada, yaitu kerja sama dalam setiap kegiatan yang menyangkut gotong royong, dan mengikuti rapat.

- b. menurut bapak/ibu adakah kendala dalam berintraksi antara pemerintahan kampung dengan masyarakat?

Jawab : ada, sebagian masyarakat kurang peduli dengan kepentingan bersama.

- c. menurut bapak/ibu apakah hubungan intraksi tersebut dapat dijadikan sarana untuk mengimplementasikan Qanun Nomor 4 Tahun 2011?

Jawab : Ya, karena adanya hubungan yang baik, maka sudah mengikuti Qanun yang ada.

## DAFTAR WAWANCARA

**Judul Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 4 Tahun 2011  
Tentang Pemerintahan Kampung Dalam Rangka  
Meningkatkan Pelayanan Administrasi Masyarakat Di  
Desa Arul Putih Kabupaten Aceh Tengah**

**Nama : NURHAYATI**  
**Usia : 50 Tahun**  
**Jabatan : Masyarakat Desa**  
**Alamat : Arul Putih**  
**Agama : Islam**

**1. Adanya Tujuan Yang Ingin di capai**

a. menurut bapak/ibu hal apa saja yang yang dilakukan dalam meningkatkan pelayanan administrasi masyarakat?

Jawab : tidak tau

b. menurut bapak/ibu faktor-faktor apa saja yang memepengaruhi tercapainya tujuan?

Jawab : tidak tau

c. menurut bapak/ibu kendala apa saja yang dihadapi untuk meningkatkan pelayanan administrasi?

Jawab : tidak tau

**2. Adanya mekanisme perintah dan kontrol dalam implementasi kebijakan publik**

- a. menurut bapak/ibu perintah apa yang dijalankan oleh unsur pelaksana untuk mengimplementasikan Qanun Nomor 4 tahun 2011?

Jawab : kadang kadang

- b. menurut bapak/ibu apakah perintah tersebut dapat dijalankan oleh unsur pelaksana?

Jawab : tidak

- c. menurut bapak/ibu bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap perintah yang dijalankan ?

Jawab : kadang-kadang

**3. Adanya prosedur-prosedur yang dilakukan**

- a. menurut bapak/ibu apakah ada prosedur yang dilakukan dalam kebijakan?

Jawab : kadang kadang

- b. menurut bapak/ibu apakah semua prosedur sudah terlaksana?

Jawab : kadang kadang

- c. menurut bapak/ibu apakah prosedur tersebut dapat dijalankan oleh pemerintahan kampung?

Jawab : ya

**4. Adanya intraksi pemerintah dan masyarakat**

- a. menurut bapak/ibu apakah ada intraksi yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan administrasi?

Jawab : kadang kadang

- b. menurut bapak/ibu adakah kendala dalam berintraksi antara pemerintahan kampung dengan masyarakat?

Jawab : tidak tau

- c. menurut bapak/ibu apakah hubungan intraksi tersebut dapat dijadikan sarana untuk mengimplementasikan Qanun Nomor 4 Tahun 2011?

Jawab : tidak tau

## **DAFTAR WAWANCARA**

**Judul Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 4 Tahun 2011  
Tentang Pemerintahan Kampung Dalam Rangka  
Meningkatkan Pelayanan Administrasi Masyarakat Di  
Desa Arul Putih Kabupaten Aceh Tengah**

**Nama : SERI MURNI**  
**Usia : 47 Tahun**  
**Jabatan : Masyarakat Desa**  
**Alamat : Arul Putih**  
**Agama : Islam**

**1. Adanya Tujuan Yang Ingin di capai**

a. menurut bapak/ibu hal apa saja yang yang dilakukan dalam meningkatkan pelayanan administrasi masyarakat?

Jawab : tidak tau

b. menurut bapak/ibu faktor-faktor apa saja yang memengaruhi tercapainya tujuan?

Jawab : tidak tau

c. menurut bapak/ibu kendala apa saja yang dihadapi untuk meningkatkan pelayanan administrasi?

Jawab : tidak tau

**2. Adanya mekanisme perintah dan kontrol dalam implementasi kebijakan publik**

- a. menurut bapak/ibu perintah apa yang dijalankan oleh unsur pelaksana untuk mengimplementasikan Qanun Nomor 4 tahun 2011?

Jawab : kadang kadang

- b. menurut bapak/ibu apakah perintah tersebut dapat dijalankan oleh unsur pelaksana?

Jawab : tidak

- c. menurut bapak/ibu bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap perintah yang dijalankan ?

Jawab : kadang-kadang

**3. Adanya prosedur-prosedur yang dilakukan**

- a. menurut bapak/ibu apakah ada prosedur yang dilakukan dalam kebijakan?

Jawab : kadang kadang

- b. menurut bapak/ibu apakah semua prosedur sudah terlaksana?

Jawab : kadang kadang

- c. menurut bapak/ibu apakah prosedur tersebut dapat dijalankan oleh pemerintahan kampung?

Jawab : kadang kadang

**4. Adanya intraksi pemerintah dan masyarakat**

- a. menurut bapak/ibu apakah ada intraksi yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan administrasi?

Jawab : kadang kadang

- b. menurut bapak/ibu adakah kendala dalam berintraksi antara pemerintahan kampung dengan masyarakat?

Jawab : tidak tau

- c. menurut bapak/ibu apakah hubungan intraksi tersebut dapat dijadikan sarana untuk mengimplementasikan Qanun Nomor 4 Tahun 2011?

Jawab : tidak tau

## **DAFTAR WAWANCARA**

**Judul Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 4 Tahun 2011  
Tentang Pemerintahan Kampung Dalam Rangka  
Meningkatkan Pelayanan Administrasi Masyarakat Di  
Desa Arul Putih Kabupaten Aceh Tengah**

**Nama : SABARDI MULYA**

**Usia : 45 Tahun**

**Jabatan : Masyarakat Desa**

**Alamat : Arul Putih**

**Agama : Islam**

**1. Adanya Tujuan Yang Ingin di capai**

a. menurut bapak/ibu hal apa saja yang yang dilakukan dalam meningkatkan pelayanan administrasi masyarakat?

Jawab : perlu adanya kekompakan.

b. menurut bapak/ibu faktor-faktor apa saja yang memengaruhi tercapainya tujuan?

Jawab : penyediaan alat di kantor desa.

c. menurut bapak/ibu kendala apa saja yang dihadapi untuk meningkatkan pelayanan administrasi?

Jawab : tidak tau

**2. Adanya mekanisme perintah dan kontrol dalam implementasi kebijakan publik**

- a. menurut bapak/ibu perintah apa yang dijalankan oleh unsur pelaksana untuk mengimplementasikan Qanun Nomor 4 tahun 2011?

Jawab : kadang kadang

- b. menurut bapak/ibu apakah perintah tersebut dapat dijalankan oleh unsur pelaksana?

Jawab : kadang kadang

- c. menurut bapak/ibu bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap perintah yang dijalankan ?

Jawab : perlu ada peningkatan.

**3. Adanya prosedur-prosedur yang dilakukan**

- a. menurut bapak/ibu apakah ada prosedur yang dilakukan dalam kebijakan?

Jawab : kadang kadang

- b. menurut bapak/ibu apakah semua prosedur sudah terlaksana?

Jawab : kadang kadang

- c. menurut bapak/ibu apakah prosedur tersebut dapat dijalankan oleh pemerintahan kampung?

Jawab : tidak tau

**4. Adanya intraksi pemerintah dan masyarakat**

- a. menurut bapak/ibu apakah ada intraksi yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan administrasi?

Jawab : kadang kadang

- b. menurut bapak/ibu adakah kendala dalam berintraksi antara pemerintahan kampung dengan masyarakat?

Jawab : tidak tau

- c. menurut bapak/ibu apakah hubungan intraksi tersebut dapat dijadikan sarana untuk mengimplementasikan Qanun Nomor 4 Tahun 2011?

Jawab : tidak tau

## **DAFTAR WAWANCARA**

**Judul Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 4 Tahun 2011  
Tentang Pemerintahan Kampung Dalam Rangka  
Meningkatkan Pelayanan Administrasi Masyarakat Di  
Desa Arul Putih Kabupaten Aceh Tengah**

**Nama : ALI MUSTAFA**  
**Usia : 49 Tahun**  
**Jabatan : Masyarakat Desa**  
**Alamat : Arul Putih**  
**Agama : Islam**

### **1. Adanya Tujuan Yang Ingin di capai**

a. menurut bapak/ibu hal apa saja yang yang dilakukan dalam meningkatkan pelayanan administrasi masyarakat?

Jawab : tidak tau

b. menurut bapak/ibu faktor-faktor apa saja yang memepengaruhi tercapainya tujuan?

Jawab : tidak tau

c. menurut bapak/ibu kendala apa saja yang dihadapi untuk meningkatkan pelayanan administrasi?

Jawab : tidak tau

**2. Adanya mekanisme perintah dan kontrol dalam implementasi kebijakan publik**

- a. menurut bapak/ibu perintah apa yang dijalankan oleh unsur pelaksana untuk mengimplementasikan Qanun Nomor 4 tahun 2011?

Jawab : kadang kadang

- b. menurut bapak/ibu apakah perintah tersebut dapat dijalankan oleh unsur pelaksana?

Jawab : tidak tau

- c. menurut bapak/ibu bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap perintah yang dijalankan ?

Jawab : kadang-kadang

**3. Adanya prosedur-prosedur yang dilakukan**

- a. menurut bapak/ibu apakah ada prosedur yang dilakukan dalam kebijakan?

Jawab : kadang kadang

- b. menurut bapak/ibu apakah semua prosedur sudah terlaksana?

Jawab : kadang kadang

- c. menurut bapak/ibu apakah prosedur tersebut dapat dijalankan oleh pemerintahan kampung?

Jawab : kadang kadang

**4. Adanya intraksi pemerintah dan masyarakat**

- a. menurut bapak/ibu apakah ada intraksi yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan administrasi?

Jawab : kadang kadang

- b. menurut bapak/ibu adakah kendala dalam berintraksi antara pemerintahan kampung dengan masyarakat?

Jawab : tidak tau

- c. menurut bapak/ibu apakah hubungan intraksi tersebut dapat dijadikan sarana untuk mengimplementasikan Qanun Nomor 4 Tahun 2011?

Jawab : tidak tau







*Unggul, Cerdas, dan Terpercaya*

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20228 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI  
DAN PEMBIMBING**

Nomor : 392 /SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2016

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 1 Tahun 2003 dan Rekomendasi Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara tertanggal 02 November 2016 dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : MUSARADIN  
N P M : 1303100005  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Semester : VII ( Tujuh ) Tahun Akademik 2016 /2017  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN NOMOR 04  
TAHUN 2011 TENTANG PEMERINTAHAN  
KAMPUNG DALAM RANGKA MENINGKATKAN  
PELAYANAN ADMINISTRASI MASYARAKAT DI  
DESA ARUL PUTIH KABUPATEN ACEH TENGAH.

Pembimbing I : Dedy Amrizal., S.Sos., M.Si.

Pembimbing I : Ananda Mahardika., S.Sos., M.SP.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 13 Muharram 1437 H / 26 Oktober 2015 M.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa kadaluarsa tanggal 02 November 2017**

Ditetapkan di Medan,  
Pada Tanggal 09 Shafar 1438 H  
09 November 2016 M



**Tembusan :**

1. Ketua P.s. Ilmu Administrasi Negara
2. Pembimbing I dan II ybs. Di Medan;
3. Pertinggal.



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menyaksikan surat ini, harap untuk nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Sk-3

PERMOHONAN  
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Medan, 03 Januari 2017

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : M. USARADIN

N P M : 1303100005

Jurusan : ILMU ADMINISTRASI (Kebijakan publik)

mengajukan permohonan mengikuti seminar proposal skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 397./SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2017. tanggal 3 Januari dengan judul sebagai berikut :

Implementasi kebijakan tahun 2011 tentang pemerintahan kampung dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi bagi masyarakat di desa Arul Putih Kabupaten Aceh Tengah

Bersama permohonan ini turut saya lampirkan foto copy :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK-1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda bukti lunas biaya seminar proposal skripsi;
7. Proposal skripsi yang telah disahkan oleh kedua pembimbing (rangkap 5).

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Menyetujui :

Pembimbing I

(Dedi Arizal)

Pemohon,

(MUSARADIN)

Pembimbing II

**UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor : 16 /KEP/II.3-AU/UMSU-03/F/2017

Program studi : Ilmu Administrasi Negara  
 Hari, Tanggal : Jum'at, 13 Januari 2017  
 Waktu : 08.30 s/d. selesai  
 Tempat : LAB. FISIP UMSU  
 Pemimpin Seminar : Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggung	Pembimbing I & II	Judul Proposal Skripsi
1	MUSARADIN	1303100005	1 NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	1 DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si 2 ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PEMERINTAHAN KAMPUNG DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINISTRASI BAGI MASYARAKAT DI DESA ARUL PUTIH KABUPATEN ACEH TENGAH
2	UMMI KALSUM SIREGAR	1303100006	1 RAFDINAL, S.Sos, M.AP	1 TASRIF SYAM, Drs, M.Si 2 ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.	EFEKTIVITAS KERJA BPD (BADAN PERMUSYAWARAHAN DESA) DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI DESA BAKARAN BATU KECAMATAN BATANG KUIS KABUPATEN DELI SERDANG
3	IRMA YUNITA	1303100019	1 IDA MARTINELLY, SH, MM	1 TASRIF SYAM, Drs, M.Si 2 ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.	EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROSEDUR KERJA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR CAMAT KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
4	SELA VERONIKA	1303100024	1 BANGUN NAPITUPULU, Drs, M.	1 A. HIDAYAH DLT, Drs, H, M.Si 2 AFFAN ALQUDDUS, S.Sos	PENGARUH KINERJA PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PENGURUSAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI KANTOR UFT SAMSAT AEK KANOPAN LABUHAN BATU UTARA
5	PENZO NOFRIHADI PUTRA	1303100041	1 MARLINANG SIBUEA, M.Pd	1 IDA MARTINELLY, SH, MM 2 ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG SERTIFIKASI GURU DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA GURU DI SMK NEGERI 1 SIMEULUE TIMUR KABUPATEN SIMEULUE

Medan, 12 R. ABU 1438 H  
 11 Januari 2017 M

Dr. Tasrif Syam, M.Si



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : MUSARADDIN  
N P M : 1303100005  
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI Negara (Kebijakan publik)  
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Banun Nomor 4 tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung dalam rangka meninabatkan Pelayanan Administrasi Masyarakat di desa Anu Putih Kabupaten Aceh Tengah

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	20/2/2017	Perbaikan Kategorisasi	f.
2	20/2/2017	Perbaikan Analisis wawancara	f. f.
3	1/3/2017	Perbaikan ABSTRAK	f. f.
4	10/3/2017	Perbaikan Penulisan BAB IV	f. f.
5	17/3/2017	Perbaikan Analisis wawancara	f. f.
6	25/3/2017	Perbaikan bab IV	f. f.
7	29/3/2017	Perbaikan kesimpulan dan saran	f. f.
8	31/03/2017	ACC	f.

Medan, ...30... Maret.....2017...

Dekan,

Ketua Jurusan,

Pembimbing ke : II

(Drs. Tasrif Syam MSi)

(Naila Engrisa S.P.A.Pd)

(Amanda M. Mardiana S. Sos Pgs)



*Unggul, Cerdas & Terpercaya*

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 392/ KET/IL.3-AU/UMSU-03/F/2017  
Lampiran : -.-  
Hal : *Mohon Diberikan izin  
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 17 RabiulAkhir 1438 H  
16 Januari 2017 M

**Kepada : Yth. Bapak Kepala Desa Arul Putih  
Kecamatan Silih Nara  
Kabupaten Aceh Tengah**

di-  
Tempat

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama mahasiswa	: MUSARADIN
N P M	: 1303100005
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Semester	: VII (Tujuh) Tahun Akademik 2016 / 2017
Judul Skripsi	: <b>IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG PEMERINTAHAN KAMPUNG DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINSTRASI MASYARAKAT DI DESA ARUL PUTIH KABUPATEN ACEH TENGAH.</b>

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan *[Signature]*

*[Signature]*, M.Si.



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
KECAMATAN SILIH  
KAMPUNG ARUL PUTIH**

N.ANGKUP.WEJNI DURIN NO: TELP KODE POS 24562

Nomor : **B** /ISKIAP/2017  
Lampiran :  
Perihal : Keterangan Penelitian

Arul Putih 22 Maret 2017  
Kepada Yth  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu  
Politik Universitas Muhammadiyah  
Sumatera Utara

Di

Tempat

Assalamualaikum Wr, Bb.

Menanggapi surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara No; 392/Kete/11.3 Au/UMSU-03/F/2017 bersama Dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa

Nama : MUSARADIN  
NPM : 1303100005  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Telah selesai melakukan penelitian di Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah dengan judul Skripsi Implementasi kebijakan Qanun 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung Dalam Rangka meningkatkan Pelayanan Administrasi Masyarakat di Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara

Demikianlah surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



